

**PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN  
SEBAGAI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*  
PABRIK GULA DJOMBANG BARU TERHADAP  
MASYARAKAT SEKITAR**  
(Studi Pada Warga Griya Indah Jombang Kabupaten Jombang)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**JUNDI**

**NIM : 0710313061**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG  
2012**

**TANDA PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

Judul : Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Corporate Social Responsibility Pabrik Gula Djombang Baru Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi pada Warga Griya Indah Jombang Kabupaten Jombang)

Disusun oleh : Jundi

NIM : 0710313061

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : Non Konsentrasi

Malang, 18 Juli 2011

Komisi Pembimbing

Ketua



Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si  
NIP. 19610202 198503 1006

Anggota



Drs. Abdul Wachid, MAP  
NIP. 19561209 198703 1008

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu  
Administrasi Universitas Brawijaya, Pada:

Hari : Rabu  
 Tanggal : 01 Agustus 2012  
 Jam : 09.00 WIB  
 Skripsi atas nama : Jundi  
 Judul : **Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Sebagai  
 Corporate Social Responsibility Pabrik Gula Djombang  
 Baru Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi Pada Warga  
 Griya Indah Jombang Kabupaten Jombang)**

dan dinyatakan lulus.

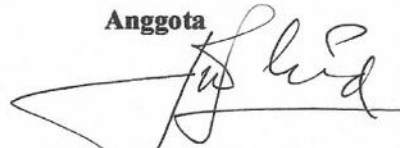
**MAJELIS PENGUJI**

**Ketua**



**Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si**  
 NIP. 19610202 198503 1006

**Anggota**



**Drs. Abdul Wachid, M.AP**  
 NIP. 19561209 198703 1 008

**Ketua**



**Dr. Bambang Santoso Haryono, Ms**  
 NIP. 19610204 198601 1 001

**Anggota**



**Ainul Hayat, SPd, M.Si**  
 NIP. 19730713 200604 1 001



## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 2 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, Juli 2012



Nama: Jundi

NIM : 0710313061

# MOTTO

**WAKTU MENGUBAH SEMUA HAL, KECUALI KITA. KITA MUNGKIN MENUA DENGAN BERJALANANNYA WAKTU, TETAPI BELUM TENTU MEMBIJAK. KITALAH YANG HARUS MENGUBAH DIRI KITA SENDIRI.**

*(Mario Teguh)*

**KEGAGALAN HANYA TERJADI BILA KITA MENYERAH DAN TIDAK BERBUAT APA – APA.**

*(Lessing)*

LEMBAR  
PERSEMBAAN

Pertama saya ucapkan  
terimakasih sebesar - be-  
sarnya kepada

الله

ALLAH SWT

yang memberikan umur  
sampai saat ini, sehingga  
saya dapat mengerjakan  
skripsi ini

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Thank's For My Family*

*Saya ucapkan Terimakasih kepada keluarga  
saya, mulai kedua Orang tua, NurBagio dan Sri  
Rufiati, Kakak dan Adik saya, Eki Sulisty Wati dan  
Bugik Prasetyo, dan Suami dari Kakak saya Wawan  
dan Anaknya Arsyah, terimakasih telah selalu men-  
doakan dan mendukung saya,*

*Love U All, Always...*

*Kalian selalu ada disetiap saya membutuhkan apa2,  
selalu memberi solusi dari segala masalah yang te-  
lah saya hadapi.*

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN BUAT**

**SEMUANYA...**



THANK'S FOR ALL

Dari mulai teman Bolang,



Untuk para temen Bolang saya ucapkan terimakasih buat kalian semua, secara tidak langsung kalian telah membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini, dmn disaat otak lagi strees,buntu,gak bisa mikir, kalian ajak refresing, jadi otak saya segar kembali, dan dapat melanjutkan mengerjakan skripsi ini.



Dan Untuk teman kampus + teman Kontrakan TataSurya 1/10, thanks Bro, gak ada loe gak rame pokok e, hahahahaha....



4 jempol deh buat kalian,



Untuk teman-teman Gowes. Ini juga temen2 yg ngajak untuk sehat+Refresing , yg selalu ngajak bersepeda ria, didesa,sawah-sawah yang hijau pegunungan yg indah2, Sudah berapa gunung yg kalian daki :D (Ojok Ambigu L0 Y0 ) dan setelah lulus ini semoga acara GOWES ini tetep lanjut..



Dan tak ketinggalan buat Pacar nih hehehehhe...  
Suwun ya car, yg selalu cerewet, yg ngomel2 yg nyuruh2 buat ndang diselesain skripsinya, ini wes tak selesain kok, hahahahaha..



Itu foto pas aku nunggu kamu Kompre da kamu juga nunggu Kompreku impas ya ..  
Aq lo asline nunggu km, ben iso wisuda bareng, apikan kan Aku

Kurang apa coba :D

..LOVE U CAR, LOVE U ALL..

## RINGKASAN

Jundi. 2012. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai Corporate Social Responsibility Pabrik Gula Djombang Baru Terhadap Masyarakat Sekitar (Studi pada Warga Griya Indah Jombang Kabupaten Jombang), Ketua Komisi Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si, Anggota Komisi Pembimbing: Drs. Abdul Wachid, M.A.P. 123 + x

---

Program Kemitraan Program Bina Lingkungan bentuknya adalah hibah. Tujuannya adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah usaha perusahaan. Dalam implementasinya, program ini berbentuk *charity* dan *social investment*. Program *charity* diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk kedermawanan perusahaan. Sedangkan program *social investment* diberikan perusahaan untuk menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar lingkungan usaha. Baik Program Kemitraan maupun Program Bina Lingkungan, kedua program tersebut sumber dananya berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan yang nilainya maksimal masing-masing program yaitu sebesar 2% (dua persen).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar, dan menganalisis dampak penerimaan program kemitraan dan bina lingkungan sebagai *corporate social responsibility*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis masalah.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa Pabrik Gula Djombang Baru sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melaksanakan pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan yang dilakukan oleh Perseroan adalah memberikan bantuan berupa pinjaman modal kerja dan pembinaan. Sedangkan Bina Lingkungan adalah program bantuan yang bersifat *charity*, diberikan Perseroan kepada masyarakat melalui enam fokus program bantuan yaitu program pembangunan bencana alam, program pendidikan dan bencana alam, program peningkatan kesehatan masyarakat, program pembangunan sarana umum, program pembangunan sarana ibadah, program pelestarian lingkungan. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar yaitu adanya dukungan dari dukungan *stakeholder* antara lain dari pengelola perusahaan, para pemegang saham, pemerintah serta masyarakat yang menjadi mitra binaan. Dampak program kemitraan dan bidang lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru yaitu memberikan kemanfaatan secara ekonomi, sosial, dan ekologi.



## SUMMARY

Jundi. 2012. Partnership program and Environment Build as Corporate Social Responsibility Djombang's Sugar Factory New To vicinity Society (Study on Citizen Griya Indah Jombang Jombang Regency), Commission Chairman Advisors: Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si., Commission Member Advisor: Drs. Abdul Wachid, M.A.P. 123 + x

---

Partnership program, Program Builds its form Environment be donation. Its aim is subject to be empower and develop society social condition and environmentally region around corporate effort. In its implementation, this program gets form *charity* and *social investment*. Program *charity* given unto by society as shaped as corporate generosity. Meanwhile program *social investment* given by firm to look after sustainable effort and increases society life quality around environmentally effort. Well partnership Program and also Environmental Build Program, both of that program its fund source indigenous corporate net profit appropriation that its maximal point each program which is as big as 2% (two percents).

This research intent to describe and analysis is performing Programs partnership and Sugared Factory Environment Build Djombang Baru To vicinity society, analysis is factor that regard partnership Program performing and Sugared Factory Environment Build Djombang Baru To vicinity society, and analysis is acceptance impact programs partnership and environment build as *corporate social responsibility*. The method used in this study was a qualitative descriptive study using qualitative methods to analyze the problem.

Base analysis result points out that Djombang Sugared Factory New as one of Effort Badan Usaha Milik Negara (BUMN) have performed corporate social accountability in shaped partnership Program and Environment Build (PKBL). Program partnership that did by co partnership is give help as unsecured as working capital and construction. Meanwhile Environment Build is program help that gets character *charity*, given by co partnership to society via six focus program helps which is act of god development programs, education and act of god program, health's increasing program society, common medium development program, medium development program religious service, abiding program environmentally. Factor that regard partnership Program performing and Sugared Factory Environment Build Djombang Baru To vicinity society which is marks sense support of support *stakeholder* for example of managing corporate, stockholders, government and society that becomes training partner. Partners program impact and Sugared Factory environment areas Djombang Baru which is gives benefit economy, social, and ecology.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, **PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN SEBAGAI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PABRIK GULA DJOMBANG BARU TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR (Studi pada Warga Griya Indah Jombang Kabupaten Jombang)**. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan program ini telah diberikan perusahaan kepada masyarakat sekitar.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai prasyarat untuk mencapai gelar Sarjana Administrasi Publik di Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Abdul Hakim, M.Si dan Bapak Drs. Abdul Wachid, M.A.P. selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen beserta Karyawan- karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Kedua orang tua dan seluruh anggota keluarga yang tiada henti- hentinya memberi dukungan dan mendoakan saya.
6. Bapak Wasis Pramono selaku Kepala Bidang PKBL beserta staf Pabrik Gula Djombang Baru yang membantu dalam penelitian saya disana dan masyarakat sekitar Pabrik Gula Djombang Baru.
7. Semuanya pihak yang belum disebutkan yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan penulis, untuk itu saran dan kritik yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat lebih bermanfaat.

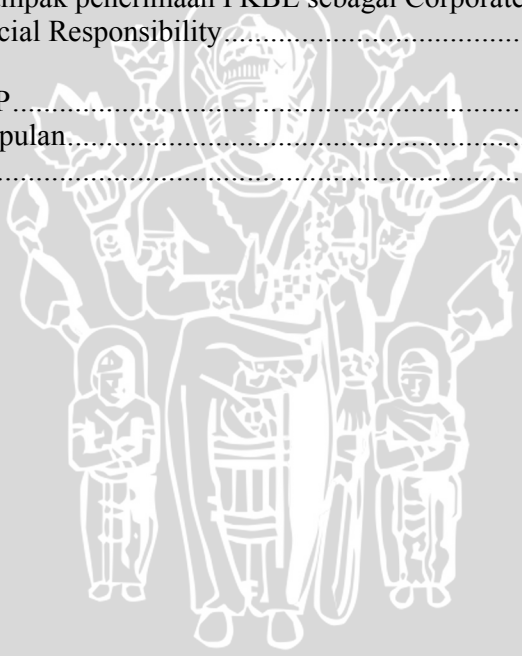
Malang, Juli 2012

Jundi  
NIM : 0710313061

## DAFTAR ISI

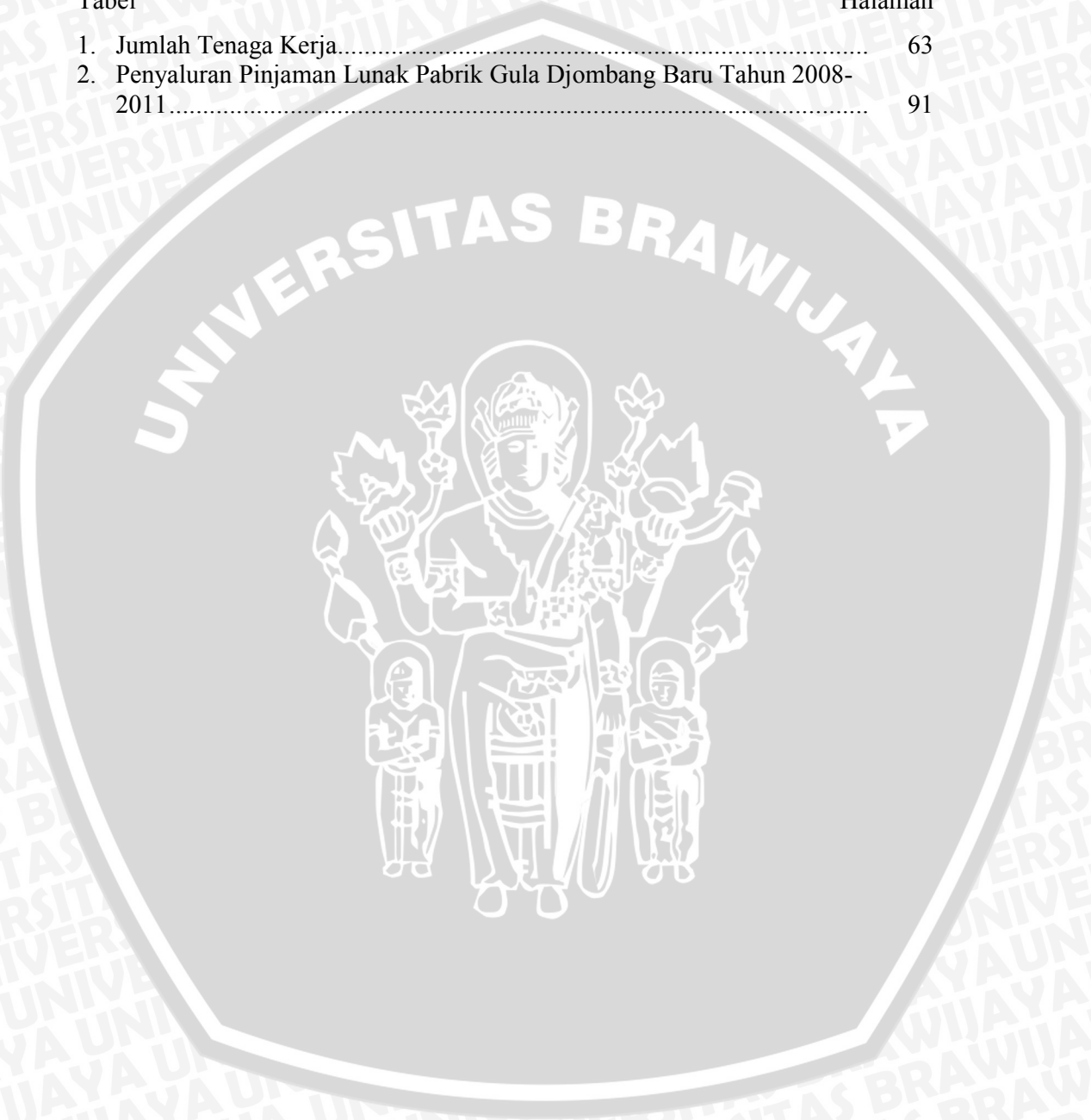
MOTTO .....	i
RINGKASAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Administrasi Publik .....	10
B. <i>Good Governance</i> .....	11
C. <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .....	21
1. Pengertian <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> .....	21
2. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	22
3. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	24
D. <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai Investasi Sosial .....	28
E. <i>Corporate Social Responsibility</i> sebagai Manifestasi <i>Community Relations</i> .....	33
F. Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (PKBL).....	37
<b>BAB III</b> <b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>51</b>
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Fokus Penelitian.....	52
C. Lokasi Penelitian .....	53
D. Sumber Data .....	53
E. Teknik Pengumpulan Data .....	54
F. Teknik Analisis Data.....	55
G. Keabsahan Data .....	56
<b>BAB IV</b> <b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>58</b>
A. Hasil Penelitian .....	58
1. Gambaran Umum Perusahaan .....	58
2. Struktur Organisasi .....	61
3. Personalia .....	69
4. Produksi dan Hasil Produksi.....	73
5. Pemasaran .....	78

6. Tujuan Perusahaan .....	79
B. Penyajian Data Fokus .....	
1. Pelaksanaan PKBL Pabrik Gula Djombang Baru terhadap Masyarakat Sekitar .....	80
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PKBL Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar.....	89
3. Dampak penerimaan PKBL sebagai Corporate Social Responsibility.....	95
C. Pembahasan .....	100
1. Pelaksanaan PKBL Pabrik Gula Djombang Baru terhadap Masyarakat Sekitar .....	100
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PKBL Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar.....	107
3. Dampak penerimaan PKBL sebagai Corporate Social Responsibility.....	114
 BAB V PENUTUP.....	120
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran .....	122
 DAFTAR PUSTAKA	



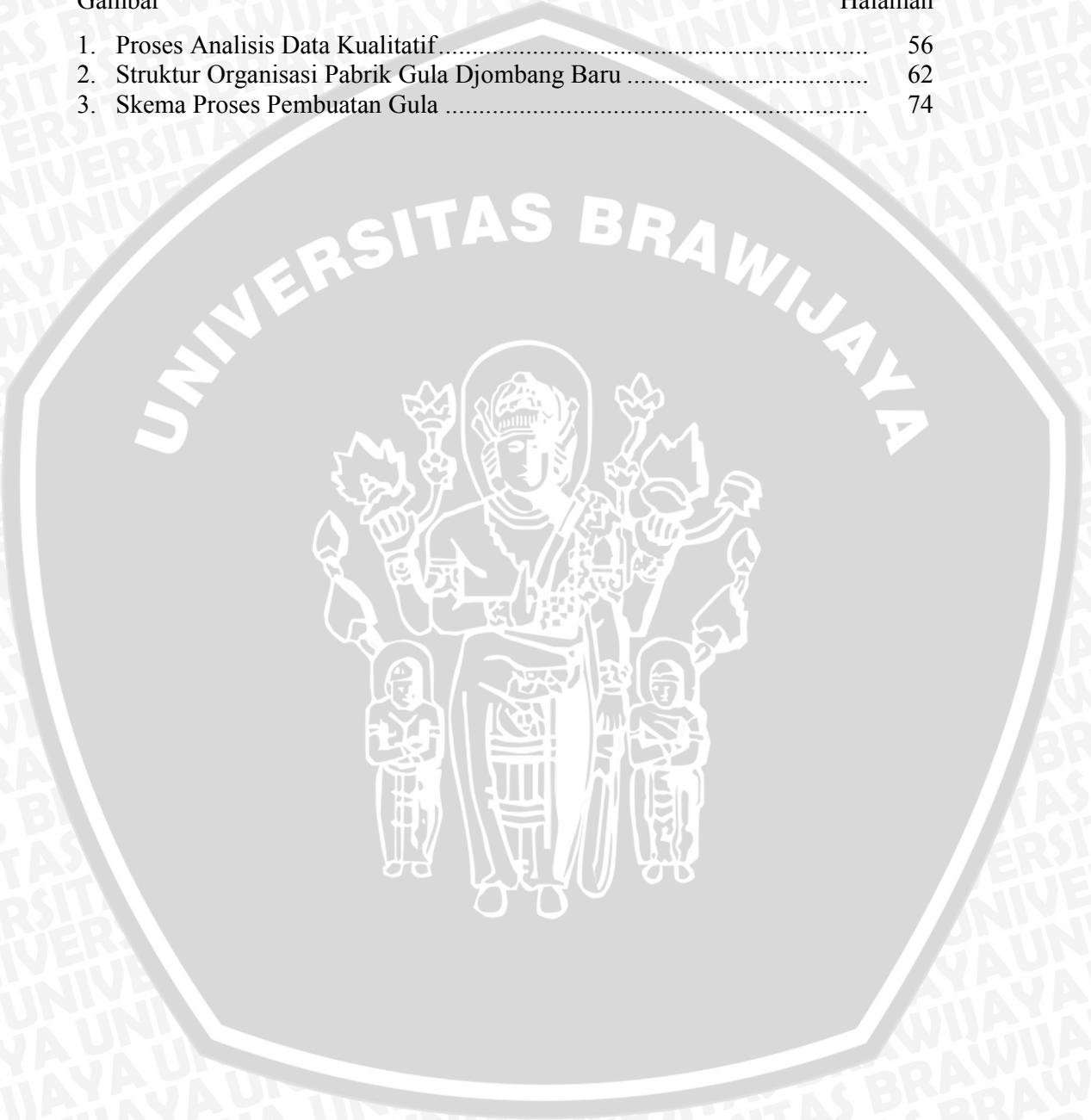
## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Tenaga Kerja.....	63
2. Penyaluran Pinjaman Lunak Pabrik Gula Djombang Baru Tahun 2008-2011.....	91



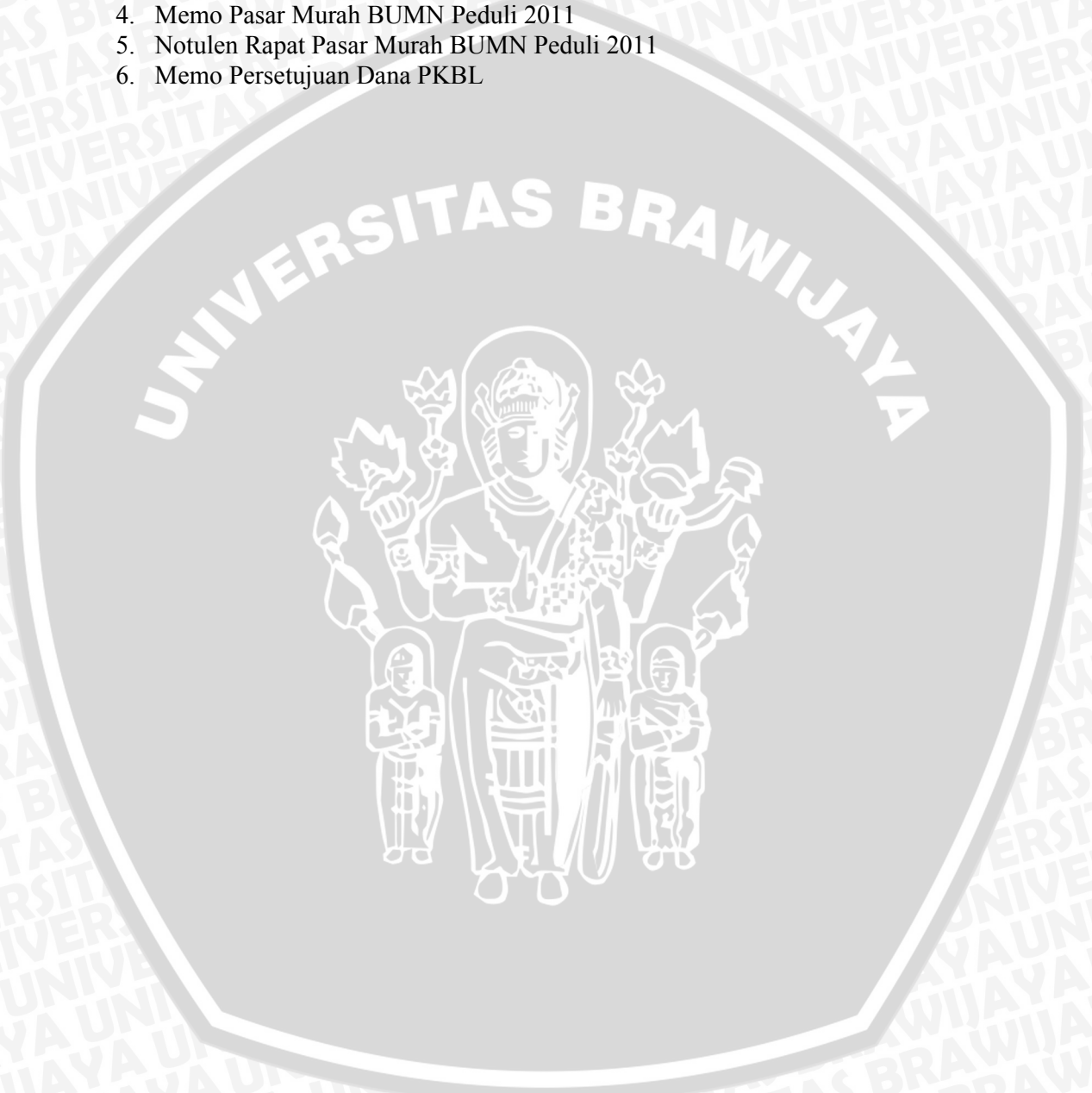
## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses Analisis Data Kualitatif.....	56
2. Struktur Organisasi Pabrik Gula Djombang Baru.....	62
3. Skema Proses Pembuatan Gula.....	74



### DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Survey
2. Surat Keterangan Melakukan Penelitian
3. Memo Persetujuan Bantuan Bina Lingkungan
4. Memo Pasar Murah BUMN Peduli 2011
5. Notulen Rapat Pasar Murah BUMN Peduli 2011
6. Memo Persetujuan Dana PKBL





## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Orientasi bisnis pada pelipatgandaan modal telah menjadi elemen dasar dari berjalannya sebuah usaha. Hal ini menyangkut bagaimana setiap usaha yang dilakukan dapat memberikan hasil yang menguntungkan dan sebesar-besarnya, baik itu dalam hal produksi, distribusi, dan penjualan. Sampai di kemudian hari muncul isu tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) menjadikan *capital orientation* ini menjadi masalah.

Bukan tanpa sebab, modal dalam hal ini modal keuangan menjadi isu pokok dalam sebuah dunia usaha. Semuanya terakumulasi bahwa perhatian korporat hanya tertuju pada bagaimana meningkatkan modal dan keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat secara langsung. Bahwa pilar usaha, yang salah satunya adalah masyarakat (*community*) hanya mendapatkan perhatian secara struktural bukan pada pemberdayaan dan tentunya dipandang dari kaca mata bisnis, yaitu bagaimana komunitas yang merupakan calon konsumen dan yang telah menjadi konsumen itu sendiri mampu mendatangkan keuntungan bagi korporat. Tetapi paradigma ini mulai bergeser pada sebuah paradigma yang memungkinkan korporat untuk memiliki modal jangka panjang yang berkelanjutan selain materi. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa ada investasi jangka panjang yang

dilakukan oleh korporat tersebut secara khusus. Paradigma ini nantinya akan memiliki keterkaitan dengan pola sinergi yang harus dibangun antara *government*, *stakeholders*, dan *corporate*. Sehingga signifikansi dari keberadaan tiga pilar utama dunia usaha ini dapat berhasil guna dalam menghasilkan terobosan selain hal materi. Lebih lanjut, perlu dipahami komunitas disini dimaksudkan dengan segala aspeknya yang memiliki determinisme secara signifikan bagi kelangsungan kehidupan sosial komunitas tersebut yang dapat diamati dalam beberapa dimensi, yaitu *human*, *social*, *economy*, dan *environment*. Terminologi *human* merupakan rangkuman yang mengakumulasi segala sesuatu yang menyangkut dengan pemeliharaan terhadap modal manusia itu sendiri secara individu yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap jasa modal manusia. Sedangkan sosial adalah hal mengenai modal sosial dan yang nantinya akan memiliki jejaring pada hal biaya untuk kebersamaan dan fasilitas bersama. Dalam hal ekonomi merupakan biaya hidup yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan segala sesuatu yang dapat disebut kebutuhan kelas dua dan seterusnya. Untuk *environment*, dipahami bahwa perlu ada keberlanjutan dalam bidang lingkungan hidup atau dengan kata lain ada lingkungan alam yang harus dipelihara sehingga dapat menopang keberlanjutan eksistensi manusia dengan segala tanggung jawab sosialnya.

Dengan tuntutan pada dunia usaha (korporat) yang semakin hari akan semakin meningkat terutama dalam hal persaingan usaha dalam hal

peningkatan kompetensi usaha, *corporate governance* sampai kepada permasalahan yang menyangkut pada kepentingan *stakeholders*, akan semakin membuat korporat waspada dan terus berinovasi. Sehingga ada kecenderungan saat ini banyak korporat yang menerapkan pola kemitraan (*partnership*) dengan setiap *stakeholders*-nya untuk turut serta dalam pembangunan, serta secara langsung dapat pula meningkatkan kinerja korporat sehingga mampu menjadi perusahaan yang kompetitif. Dalam hal ini bukan lagi hal uang yang menjadi tolok ukur tetapi bagaimana korporat mampu menjalankan fungsinya dengan baik dan konsisten terhadap pembangunan berkelanjutan.

Saat ini berkembang sebuah konsep yang diterjemahkan dari paradigma *sustainability development*, yaitu *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR ini pada intinya merupakan sebuah strategi yang diterapkan oleh korporat untuk melibatkan komuniti dalam mata rantai usahanya. Dengan melakukan perbaikan lingkungan, keterikatan dengan komuniti-komuniti, peningkatan sumber daya manusia, dan keterikatan dengan kebijakan perusahaan, maka korporat pun mendapatkan keuntungan secara tidak langsung yang sifatnya berupa investasi jangka panjang, seperti pengurangan resiko konflik dan peningkatan modal sosial (Iriantara, 2004:48).

Aktivitas korporat tidak lagi bersandar pada aturan yang diterapkan secara ketat dengan dasar prinsip ekonomi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, akan tetapi lebih cenderung untuk berubah ke arah tanggung jawab sosial terhadap komuniti lokal. Keuntungan yang dapat diperoleh adalah nilai kepercayaan dari komuniti lokal terhadap korporat. Khusus untuk peningkatan

kepercayaan komuniti, bukanlah suatu hal dapat dengan mudah dibangun apalagi dengan mempertimbangkan bagaimana dinamika sosial yang dimiliki oleh komuniti tersebut.

Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil, bentuknya adalah *community development* (pemberdayaan masyarakat). Yang mempunyai tujuan untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, terciptanya lapangan kerja serta kesempatan berusaha untuk masyarakat. Sehingga berdasarkan tujuan tersebut, implementasi program ini berbentuk kegiatan peminjaman modal usaha kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang ingin mengembangkan usahanya (Jafar, 1999:84).

Berbeda dengan Program Kemitraan, Program Bina Lingkungan bentuknya adalah hibah. Tujuannya adalah untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi sosial masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah usaha perusahaan. Dalam implementasinya, program ini berbentuk *charity* dan *social investment*. Program *charity* diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk kedermawanan perusahaan. Sedangkan program *social investment* diberikan perusahaan untuk menjaga keberlanjutan usaha dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar lingkungan usaha. Baik Program Kemitraan maupun Program Bina Lingkungan, kedua program tersebut sumber dananya berasal dari penyisihan laba bersih perusahaan yang nilainya maksimal masing-masing program yaitu sebesar 2% (dua persen).

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan metode perusahaan di dalam menerapkan tindakan *Corporate Social Responsibility*.

Namun, sebenarnya ada banyak cara atau metode pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* yang telah diterapkan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Biasanya antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, metode yang digunakan berbeda-beda. Hal tersebut tergantung pada kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial masyarakat yang berada di sekitar perusahaan, serta diharapkan dapat maju dan berkembang secara harmonis bersama masyarakat dan lingkungan sekitar.

Lebih lanjut, modal sosial menjadi layak untuk dijadikan bahan pertimbangan dan penelitian dalam proses penyusunan program CSR adalah karena selain melihat bahwa modal sosial sebagai aturan yang tumbuh dalam komunitas yang merujuk pada hubungan antar individu, jaringan sosial, norma sosial dan rasa saling percaya yang tumbuh diantaranya, juga bahwa konsep dari CSR itu sendiri, yaitu pembangunan yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat tentunya membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mendukung proses terlaksananya program CSR yang tepat sasaran.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mengangkat sebuah perusahaan pemerintah yang dalam implementasi CSR-nya sudah cukup mapan melalui PKBL, yaitu Pabrik Gula Djombang Baru. Pabrik Gula Djombang Baru adalah salah satu Unit Usaha Strategis (UUS) milik PT. Perkebunan Nusantara X (PERSERO) yang berkantor pusat di Jl. Jembatan Merah 3-5 Surabaya, merupakan perusahaan milik Negara dibawah Departemen teknis Kehutanan dan Perkebunan, sedangkan operasionalnya dibawah Menteri Negara BUMN. Sebagai salah satu dari 12 pabrik gula dilingkungan PT. Perkebunan

Nusantara X (Persero), yang turut andil dalam pemasok kebutuhan gula Nasional pada umumnya dan Jawa Timur khususnya.

Dari jumlah produksi nasional sebesar 1,9 juta ton PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) telah menghasilkan 293.000 ton gula atau 15,4 % dari produksi Nasional, sehingga masih terbuka lebar kesempatan dan peluang untuk memproduksi gula sebanyak-banyaknya di dalam negeri. Tentu Pabrik Gula Djombang Baru dan membantu memasok gula nasional. Pabrik Gula Djombang Baru sebagai suatu Industri gula, seperti industri lainnya tidak lepas dari dampak lingkungan yang dirasa merugikan, sehubungan dengan itu disadari dan telah diupayakan untuk penanganan dampak lingkungan secara serius dan berkesinambungan dengan teknologi yang memadai. Sebagai rasa tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, Pabrik Gula telah melakukan kegiatan sosial untuk masyarakat sekitar berupa pelayanan kesehatan masal, pembagian sembako, pembersihan lingkungan, bantuan untuk rumah ibadah, bantuan sarana umum dan olahraga, dan lain-lain. Dengan melihat pada dasar hukum ini maka peranan Pabrik Gula Djombang Baru menjadi sangat strategis tidak hanya bagi kepentingan negara ini secara khusus tetapi juga bagi kepentingan masyarakat luas, dengan kata lain masyarakat turut aktif dalam memberdayakan dirinya sehingga berhasil guna.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar?
3. Bagaimana dampak penerimaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai *corporate social responsibility*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar.
- b. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar.
- c. Menganalisis dampak penerimaan program kemitraan dan bina lingkungan sebagai *corporate social responsibility*.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan daerah.

- b. Bagi pihak lain, dapat dijadikan sebagai acuan atau rujukan untuk melakukan penelitian lanjutan yang serupa.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Di sini sistematika pembahasan dimaksudkan untuk menyusun secara lebih terperinci keseluruhan dari suatu karya ilmiah dengan tujuan untuk dapat lebih mudah mengerti isi dari suatu karya ilmiah itu sendiri. Gambaran secara menyeluruh mengenai pokok-pokok isi dari skripsi ini dan untuk mempermudah dalam penyusunan nanti, maka penulis memberikan gambaran secara singkat mengenai sistematika pembahasan sebagai berikut :

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang masalah selanjutnya dibahas mengenai rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan penjelasan mengenai tinjauan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian, mengenai teori-teori yang dipakai yang sesuai dengan objek penelitian yaitu Administrasi Publik, *Good Governance*, *Good Corporate Governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* sebagai Investasi Sosial, *Corporate Social Responsibility* sebagai Manifestasi *Community Relations*, dan Program Kemitraaan dan Bina Lingkungan.



### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini merupakan penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, yang mencakup jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Secara garis besar isi dari hasil penelitian tentang gambaran umum perusahaan, struktur organisasi, personalia, produksi dan hasil produksi, pemasaran, tujuan perusahaan, dan penyajian data fokus serta pembahasan mengulas tentang pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru dan dampak penerimaan program kemitraan dan bina lingkungan sebagai *corporate social responsibility*.

### **BAB V : PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran hasil penelitian diuraikan secara garis besar merupakan temuan pokok yang menjawab tujuan penelitian, baik yang bersifat substansial maupun metode teknis serta dikemukakan pula implementasi dari hasil pembahasan, dan harus bersesuaian dengan tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi terhadap studi lanjutan dan kebijakan-kebijakan yang akan datang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Administrasi Publik

Administrasi merupakan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Nawawi dalam Wiyoto (2005:13), “Pada prinsipnya administrasi secara luas memiliki pengertian yang sama yaitu antara lain adalah Kerjasama, lebih dari satu orang (banyak orang), untuk mencapai tujuan bersama.” Sedangkan apabila administrasi diuraikan secara sempit sebagaimana yang sering kita dengar yaitu tata usaha.

Selanjutnya administrasi menurut Nigro dalam Syafie (1997:58), adalah :

Usaha kelompok bersifat komperatif yang diselenggarakan dalam suatu lingkungan publik, meliputi seluruh tiga cabang pemerintah (eksekutif, yudikatif, legislatif) serta sinergi diantara ketiganya, mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijakan publik (*public policy*) dan merupakan bagian dari proses politik, amat berbeda dengan administrasi privat, berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Administrasi publik menurut Nigro dalam Sukidin (2009:10-11), bahwa administrasi publik itu adalah:

1. Usaha kelompok bersifat kooperatif yang diselenggarakan dalam satu lingkungan publik;
2. Meliputi seluruh tiga cabang pemerintahan: eksekutif, yudikatif, legislatif, serta pertalian diantara ketiganya.
3. Mempunyai peranan penting dalam formulasi kebijakan publik (*public policy*) dan merupakan bagian proses politik

4. Amat berbeda dengan administrasi privat
5. Berhubungan erat dengan kelompok-kelompok privat dan individual dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih lanjut Henry dalam Indradi (2008:12) mendefinisikan Administrasi Publik sebagai berikut :

Sebagai suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktek, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi Publik berusaha melembagakan praktek-praktek manajemen agar sesuai dengan nilai-nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik.

Administrasi publik sangat penting agar penilaian keberhasilan seorang administrator atau aparat pemerintah tidak semata didasarkan pada pencapaian kriteria efisiensi, ekonomi, dan prinsip-prinsip administrasi lainnya, tetapi juga kriteria moralitas, khususnya terhadap kontribusinya terhadap kepentingan umum.

## **B. *Good Governance***

Bahwasannya untuk memahami konsep antara *governance* dan juga *good governance*, maka terlebih dahulu yang perlu ditekankan adalah kita dapat membedakannya dengan konsep *government* yang terdapat dalam era klasik dalam NPM.

*Governance* dan *government*, bahwasannya untuk memahami perbedaan antara *governance* dan *government*, Schwab dan Kubler (2001) melihatnya dari 5 (lima) fitur dimensi berdasarkan pengamatan terhadap

interaksi pada sebuah kontinum pengaturan kebijakan antara governance dan government sebagai berikut:

1. Dimensi actor
2. Dimensi fungsi
3. Dimensi struktur
4. Dimensi konvensi dari interaksi; dan
5. Dimensi distribusi dari kekuasaan

Senada dengan pandangan Schwab and Kubler diatas, Stoker (1998) mengemukakan 5 (lima) proposisi mengenai *governance* sebagai berikut (Ewalt, 2001):

1. *Governance* merujuk kepada institusi dan actor yang tidak hanya Pemerintah.
2. *Governance* mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggungjawab dalam mengatasi isu sosial dan ekonomi.
3. *Governance* mengidentifikasi adanya ketergantungan dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam aksi kolektif.
4. *Governance* adalah mengenai *self-governing* yang otonom dari aktor-aktor.
5. *Governance* menyadari untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung kepada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya.

LAN (2000:6), arti *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian : pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi

keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial : kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada, yaitu : pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi pertama mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemen konsituennya seperti *legitimacy* (apakah dipilih dan mendapat kepercayaan dari rakyatnya), *accountability* (akuntabilitas), *securing of human rights*, *autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua, tergantung pada sejauhmana pemerintahan mempunyai kompetensi, dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Perubahan paradigma dari pemerintah (*government*) menjadi pemerintahan (*governance*) merupakan wujud interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat (*civil society*) untuk menanggulangi berbagai masalah kontemporer yang demikian kompleks, dinamis dan beraneka. Peran pemerintah adalah menyediakan ruang publik yang memungkinkan setiap potensi masyarakat dapat berkiprah dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Pemerintahan yang demokratis adalah milik masyarakat

karena itu tugasnya ialah memberdayakan seluruh potensi masyarakat untuk berperan-peran secara aktif.

Peran pemerintah adalah membangun kesepakatan dan keselarasan di antara berbagai kepentingan yang berbeda karena tidak jarang terjadi berbagai konflik kepentingan misalnya antara dinas dan yayasan/LSM atau majikan dengan buruh.

Unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau *good governance*, menurut Lembaga Administrasi Negara adalah partisipasi, akuntabilitas, transparansi, supermasi hukum. Pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip otonomi daerah dituntut untuk melibatkan seluruh elemen dan komponen masyarakat untuk berperan serta membangun dirinya. Pada waktu lalu pemerintah cenderung mengabaikan aktualisasi keberadaan masyarakat sebagai subyek pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Masyarakat cenderung menjadi obyek sehingga dampaknya adalah ketidakberdayaan, keterpurukan, kemiskinan dan pembodohan.

*Good Governance* sebagai suatu tata cara penggunaan kekuasaan negara dalam mengelola sumber daya ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat. Konsep governance muncul pertama kali pada era 1990an, hal tersebut disebabkan karena dampak negatif dari penekanan yang tidak pada tempatnya terhadap efisiensi dan ekonomi dalam pengelolaan masalah-masalah publik mulai menyebabkan menurunnya penyampaian pelayanan publik kepada masyarakat khususnya menyangkut barang-barang yang bersifat publik (*public goods*). Barang-barang publik tersebut ternyata tidak

dapat disediakan secara memadai melalui penerapan yang ketat dari kekuatan pasar. Melalui penerapan yang berlebihan terhadap perilaku manajemen sektor privat telah menyebabkan sektor publik kehilangan orientasinya terhadap tanggung jawab yang diembannya untuk kepentingan umum publik. Karenanya, dalam konteks inilah konsep *governance* yang memiliki fokus perhatian terhadap partisipasi, kepentingan masyarakat, kesetaraan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan masalah-masalah publik mulai mendapatkan perhatian dari berbagai pihak. Melalui penerapan konsep *governance* diharapkan dapat mengembalikan perhatian dari Administrasi Publik terhadap kepentingan umum publik, khususnya dengan melibatkan partisipasi dari publik dalam proses pemenuhan kepentingan publik (Kurniawan, 2006:12).

*Good governance* merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan dan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan untuk melaksanakan penyelenggaraan *good governance* (pemerintahan yang baik) adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Tuntutan tersebut sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

*Good governance* secara konseptual berarti baik, sehingga *term good governance* menurut Sadhana (2010:272) mengandung dua makna yaitu :

1. Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.

2. Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia menterjemahkan istilah “*good governance*” dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Tjokroamidjojo, 1995:56) tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 memperjuangkan adanya *good governance and clean government*. Tuntutan yang diajukan ini merupakan reaksi terhadap keadaan pemerintah pada era Orde Baru dengan berbagai permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada Presideri, baik akibat konstitusi (UUD 45) maupun tidak berfungsi dengan baik lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya, serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam membenkari kontrol sosial.

Ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan *good governance*, yakni: pemerintah (*the state*), *civil society* (masyarakat adab, masyarakat madani, masyarakat sipil), dan pasar atau dunia usaha. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab baru tercapai bila dalam penerapan otoritas politik, ekonomi dan administrasi ketiga unsur tersebut memiliki jaringan dan interaksi yang setara dan sinerjik. Interaksi dan kemitraan seperti itu biasanya baru dapat berkembang subur bila ada kepercayaan (*trust*), transparansi, partisipasi, serta tata aturan yang jelas dan pasti, *Good governance* yang sehat juga akan



berkembang sehat di bawah kepemimpinan yang berwibawa dan memiliki visi yang jelas.

Kunci utama memahami *good governance*, menurut Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang mendasarinya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini didapat tolok ukur kinerja suatu pemerintah.

Prinsip-prinsip tersebut meliputi:

1. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi ; menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.
2. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.
4. Peduli dan *stakeholder*: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.

5. Berorientasi pada *consensus*: tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur.
6. Kesenjangan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
7. Efektivitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.
8. Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan.
9. Visi strategis : para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemaaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.

Menurut *United Nation Development Programe* (UNDP) beberapa ciri-ciri dan sekaligus menjadi prinsip utama dalam pemerintah untuk menjalankan *Good Governance* (GG) yaitu :

1. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan, baik secara langsung atau tidak melalui perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
2. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan di laksanakan tanpa pandang bulu.
3. *Transparency*, adanya keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan menerima informasi, dimana informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dan dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan secara tepat waktu.
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan publik
5. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas
6. *Equity*, setiap masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam menerima kehidupan yang sejahtera serta keadilan dimata hukum
7. *Efficiency and effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna
8. *Accountability*, pertanggung jawaban kepada publik dari setiap aktivitas yang telah dilakukan
9. *Strategic vision*, penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi yang jauh kedepan. (Mardiasmo, 2002:24)

Dengan demikian sudah sewajarnya apabila pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta atau dunia usaha dalam rangka mensejahterakan

masyarakatnya, dimana salah satunya dalam bentuk pendirian badan usaha milik negara (BUMN) yang mana kepemilikan 51% dari total saham yang ada di perusahaan tersebut adalah milik pemerintah.

*Good governance* hanya bermakna bila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. Jenis lembaga tersebut adalah sebagai berikut :

1. Negara
  - a. menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil;
  - b. membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan;
  - c. menyediakan *public service* yang efektif dan *accountable*;
  - d. menegakkan HAM;
  - e. melindungi lingkungan hidup;
  - f. mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik
2. Sektor swasta:
  - a. Menjalankan industri;
  - b. Menciptakan lapangan kerja;
  - c. Menyediakan insentif bagi karyawan;
  - d. Meningkatkan standar kehidupan masyarakat;
  - e. Memelihara lingkungan hidup;
  - f. Mentaati peraturan;
  - g. Melakukan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat;
  - h. kredit bagi pengembangan UKM
3. Masyarakat madani:
  - a. Menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi;

- b. Mempengaruhi kebijakan;
- c. Berfungsi sebagai sarana *checks and balances* pemerintah;
- d. Mengawasi penyalahgunaan kewenangan sosial pemerintah;
- e. Mengembangkan SDM;
- f. Berfungsi sebagai sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat.

### C. *Good Corporate Governance (GCG)*

#### 1. *Pengertian Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut Sjahdeini dalam Khairandy dan Malik (2007:76), *Good Corporate Governance (GCG)* adalah:

Konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari struktur perseroan tersebut.

*Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif yang bersumber dari budaya perusahaan, etika, sistem nilai, proses bisnis, kebijakan, dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan kinerja perusahaan
- b. Pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif
- c. Pertanggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

*Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* mengatakan di dalam Indra dan Yustiavandana (2006:25) bahwa *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut

Sebagai sekumpulan antara pihak management perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Good Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Good Corporate Governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board, dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efektif.

Jadi yang dimaksud dengan *Good Corporate Governance* merupakan sekumpulan proses dan struktur yang digunakan untuk menjalankan, mengontrol, mengelola dalam kegiatan bisnis perusahaan. Kegiatan tersebut diantaranya dengan meliputi hubungan khusus antara pemegang saham, komisaris dan komite-komitennya, direksi, pejabat eksekutif, dan konstituen lainnya (pegawai, masyarakat lokal, pelanggan dan pihak supplier) dalam rangka meningkatkan kemakmuran perusahaan dan akuntabilitas perusahaan.

Berdasarkan definisi-definisi yang disebutkan di atas peneliti menyimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika yang mengatur hubungan antara *shareholders* dengan *stakeholders* untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan.

## **2. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

*Good Corporate Governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang

saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006:98) adalah:

- a. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (*consistent law enforcement*).
- b. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan usaha.
- c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) secara obyektif dan bertanggung jawab.

Mengingat pada dasarnya *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan konsep tentang tata kelola perusahaan yang sebaik-baiknya, tentu saja di dalam pengelolaannya terdapat prinsip yang sudah pasti harus dipahami oleh perusahaan dimana esensi dari prinsip itu merupakan hal yang sangat mendasar dalam rangka implementasi *Good Corporate Governance*. Menurut *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* dalam Wahyudi dan Azheri (2008:165-167) ada empat prinsip pokok yang perlu diperhatikan dalam rangka terselenggaranya implementasi *Good Corporate Governance* yang baik yaitu :

- a. Keadilan (*fairness*)  
Hal ini berkaitan dengan bagaimana memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, baik pemegang saham minoritas, mayoritas dan ini didukung dengan adanya

keterbukaan terhadap informasi yang penting dan tepat waktu, serta melarang adanya pembagian untuk pihak sendiri dalam perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*). Prinsip ini diwujudkan dengan adanya peraturan perusahaan yang melindungi kepentingan pemegang saham.

b. **Transparansi atau Keterbukaan (*transparency*)**

Dalam hal ini selain pemegang saham mendapatkan keterbukaan informasi yang benar dan tepat waktu mengenai perusahaan juga dapat ikut dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan mendasar terhadap perusahaan dan turut memperoleh bagian keuntungan dari perusahaan. Prinsip ini digunakan untuk mencegah terjadinya penipuan. Dengan pemberian informasi berdasarkan prinsip keterbukaan ini, maka dapat diantisipasi terjadinya kemungkinan pemegang saham, investor, atau *stakeholder* tidak memperoleh informasi atau fakta material yang ada.

c. **Akuntabilitas (*accountability*)**

Prinsip akuntabilitas ini menyatakan bahwa kerangka pengelolaan perusahaan harus memastikan pedoman strategis suatu perusahaan, pengawasan efektif atas pengelolaan dewan pengawas dan para pemegang saham. Prinsip ini berimplikasi terhadap kewajiban hukum para direksi, yakni diisyaratkan untuk menjalin hubungan yang berbasis pada kepercayaan dengan pemegang saham.

d. **Responsibilitas (*responsibility*)**

Prinsip ini menyangkut tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial perusahaan sebagai bagian dari masyarakat. Perusahaan dalam memenuhi pertanggung jawabannya kepada pemegang saham dan *stakeholder* harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menyadari semakin pentingnya *Good Corporate Governance*, maka diharapkan pemerintah dan asosiasi-asosiasi bisnis di sejumlah negara, baik di negara industri ataupun negara berkembang mulai melakukan pengembangan dan perbaikan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) guna untuk meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan *stakeholder* seperti karyawan, investor dan masyarakat.

### **3. *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

a. **Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)**

Tanggungjawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) perusahaan dapat didefinisikan sebagai mekanisme bagi suatu



organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggungjawab organisasi di bidang hukum (Aggraini, 2006:112). Tanggung jawab sosial secara lebih sederhana dapat dikatakan sebagai timbal balik perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena perusahaan telah mengambil keuntungan atas masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dimana dalam proses pengambilan keuntungan tersebut seringkali perusahaan menimbulkan kerusakan lingkungan ataupun dampak sosial lainnya.

Definisi *Corporate Social Responsibility* menurut departemen Sosial RI pada tahun 2007 adalah sebuah komitmen dan kemampuan dunia usaha untuk memberi kepedulian, melaksanakan kewajiban sosial, membangun kebersamaan, melakukan program/kegiatan kesejahteraan sosial/pembangunan sosial/kesejahteraan masyarakat sebagai wujud kesetia kawatan sosial dan menjaga keseimbangan ekosistem disekelilingnya.

Adapun definisi lain mengenai *Corporate Social Responsibility*, Bank Dunia (*World Bank*) dalam Wahyudi, Isa dan Azheri, Busyra (2008:29) merumuskan definisi *Corporate Social Responsibility* sebagai “*commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives, the local community and society at large to improve*

*quality of life, in ways that are both good for business and good for development*". Apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen bisnis yang memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja sama dengan para karyawan dan perwakilan mereka, keluarga mereka, baik masyarakat setempat maupun umum, untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara-cara bermanfaat baik bagi bisnis itu sendiri maupun pembangunan.

b. Kegiatan-kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Menurut Gloutie dalam Zuhroh (2003:154) tema-tema yang diungkapkan dalam wanaca akuntansi tanggung jawab sosial adalah:

- 1) Kemasyarakatan, tema ini mencakup aktivitas kemasyarakatan yang diikuti oleh perusahaan, misalnya aktivitas yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan seni, serta pengungkapan aktivitas kemasyarakatan lainnya.
- 2) Ketenagakerjaan, tema ini meliputi dampak aktivitas perusahaan pada orang-orang dalam perusahaan tersebut. Aktivitas tersebut meliputi rekrutmen, program pelatihan, gaji dan tunjangan, mutasi dan promosi, dan lainnya.
- 3) Produk dan konsumen, tema ini melibatkan aspek kualitatif suatu produk atau jasa, antara lain kegunaan, durability, pelayanan, kepuasan pelanggan, kejujuran dalam iklan, kejelasan atau kelengkapan isi pada kemasan, dan lainnya.
- 4) Lingkungan hidup, tema ini meliputi aspek lingkungan dari proses produksi, yang meliputi pengendalian polusi dalam menjalankan operasi bisnis, pencegahan dan perbaikan kerusakan lingkungan akibat pemrosesan sumber daya alam dan konversi sumber daya alam.

Sedangkan menurut Harahap (2002:76), keterlibatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan keadaan di negara Indonesia, yaitu:

- 1) Lingkungan hidup, antara lain: pengawasan terhadap efek polusi, perbaikan pengrusakan alam, konservasi alam, keindahan lingkungan, pengurangan polusi suara, penggunaan tanah, pengelolaan sampah dan air limbah, riset dan pengembangan lingkungan, kerjasama dengan energi, yaitu antara lain: konservasi dan penghematan energi yang dilakukan oleh perusahaan dalam aktivitasnya.
- 2) Sumber daya manusia dan pendidikan, antara lain: keamanan dan kesehatan karyawan, pendidikan karyawan, kebutuhan keluarga dan rekreasi karyawan, menambah dan memperluas hak-hak karyawan, usaha untuk mendorong partisipasi, perbaikan pensiun, beasiswa, bantuan pada sekolah, pendirian sekolah, membantu pendidikan tinggi, riset dan pengembangan, pengangkatan pegawai dari kelompok miskin, dan peningkatan karir karyawan.
- 3) Praktek bisnis yang jujur, antara lain: memperhatikan hak-hak karyawan wanita, jujur dalam iklan, kredit, service, produk, jaminan, mengontrol kualitas produk, pemerintah, universitas, dan pembangunan lokasi rekreasi.
- 4) Membantu masyarakat lingkungan antara lainnya: memanfaatkan tenaga ahli perusahaan dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya, tidak campur tangan dalam struktur masyarakat, membangun klinik kesehatan, sekolah, rumah ibadah, perbaikan desa atau Kabupaten, sumbangan kegiatan sosial masyarakat, perbaikan perumahan desa, bantuan dana, perbaikan sarana pengangkutan pasar.
- 5) Kegiatan seni dan kebudayaan, antara lain: membantu lembaga seni dan budaya, sponsor kegiatan seni dan budaya, penggunaan seni dan budaya dalam iklan, merekrut tenaga yang berbakat dalam seni dan olah raga.
- 6) Hubungan dengan pemegang saham, antara lain: sifat keterbukaan direksi pada semua persero, peningkatan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan, pengungkapan keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial.
- 7) Hubungan dengan pemerintah, antara lain: mentaati peraturan pemerintah, membatasi kegiatan lobbying, mengontrol kegiatan politik perusahaan, membantu lembaga pemerintah sesuai dengan kemampuan perusahaan, membantu secara umum peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, membantu proyek dan kebijakan pemerintah, meningkatkan produktivitas sektor informal, pengembangan dan inovasi manajemen.

Model atau pola CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia menurut Said dan Abidin (2004:134) sebagai berikut:

- 1) Keterlibatan langsung, perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti corporate secretary atau public affair manager atau menjadi bagian dari tugas pejabat public relation.
- 2) Melalui yayasan atau organisasi sosial milik perusahaan, perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau groupnya. Model ini merupakan adopsi yang lazim dilakukan di negara maju. Disini perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin atau dana abadi yang dapat digunakan untuk operasional yayasan.
- 3) Bermitra dengan pihak lain, perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi non pemerintah, instansi pemerintah, universitas atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya.
- 4) Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorium, perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Pihak konsorsium yang dipercaya oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya akan secara proaktif mencari kerjasama dari berbagai kalangan dan kemudian mengembangkan program yang telah disepakati

#### **D. *Corporate Social Responsibility* sebagai Investasi Sosial**

Dalam perkembangannya terdahulu korporat lebih banyak bergerak dalam kegiatan-kegiatan yang mengusahakan atau melipatgandakan kapital yang tentunya orientasinya hanya pada bagaimana mendatangkan keuntungan bagi perusahaan tersebut dan juga hanya berkuat pada aktifitas-aktifitas perbaikan (*recovery*) lingkungan. Sedangkan dalam hubungannya dengan tanggung jawab sosial kemasyarakatan pun tidak jauh dari segala sesuatu

yang sifatnya *charity* sehingga saat ini berkembang sebuah tuntutan untuk meningkatkan atau memperbaiki tanggung jawab sosial perusahaan terhadap komuniti yang sifatnya lebih kepada pemberdayaan dan *partnership* atau kemitraan, yaitu korporat menempatkan komuniti dalam posisi yang sejajar dalam konteks bahwa keduanya adalah dua elemen yang saling membutuhkan satu sama lain. Tetapi dalam keberadaan CSR itu sendiri, korporatlah yang seharusnya memiliki inisiatif terlebih dahulu untuk membangun kepercayaan pada komunitinya. Lebih lanjut, bahwa relasi yang dibangun dengan komuniti disini adalah yang sifatnya investasi jangka panjang dan hasilnya pun tidak dapat diukur sekejap mata tetapi melalui proses panjang yang tidak jarang akan memakan waktu yang cukup lama pula. Hal ini disebabkan karena korporat membutuhkan waktu untuk memahami akan kondisi komuniti.

Sebelum lebih jauh, lebih dulu akan dijelaskan mengenai definisi CSR. Menurut Budimanta (2002:48), dalam buku *Corporate Social Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*, menyebutkan bahwa CSR adalah komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat di sekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan.

Hal inipun didukung dengan dikeluarkannya perundang-undangan oleh pemerintah, yaitu UU No. 25/2007, tentang Penanaman Modal dan UU No. 40 /2007 tentang Perseroan Terbatas. Sehingga semakin memperkuat

posisi PKBL khususnya bagi BUMN yang bergerak di bidang dan atau terkait pengelolaan sumber daya alam (SDA). Maka dengan diaturnya CSR ke dalam legalitas seperti ini maka semakin menunjukkan tingkat kepentingan CSR yang mendesak untuk diterapkan oleh semua lembaga formal maupun non formal. Tetapi permasalahannya adalah bukan kepada bagaimana korporat melakukan atau mentaati UU ini yang kesannya membatasi ruang gerak korporat dalam menjalankan kegiatannya tetapi CSR telah mampu mengupayakan sebuah kemanfaatan yang juga dirasakan oleh korporat tersebut. Tentunya fokus korporat tidak bisa berpaling dari memberikan perhatian terbesarnya pada pemberdayaan kemanunggalan komuniti.

Perlu untuk dicermati lebih lagi adalah CSR berbicara pada tataran nilai dan standar yang dilakukan berkaitan dengan segala kegiatan dalam operasional korporat. Komitmen usaha untuk bertindak secara etis dalam memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi komuniti yang juga berbarengan dengan peningkatan kualitas hidup komuniti dimaknai sebagai kemampuan individu sebagai anggota masyarakat untuk memberi respon terhadap lingkungan sosialnya serta mampu memanfaatkan sekaligus berkontribusi aktif dalam memelihara setiap modal sosial yang ada. Dengan kata lain, CSR merupakan cara atau strategi korporat untuk memproduksi dampak positif pada masyarakat (Budimanta, 2008: 77).

Dukungan terhadap CSR dibangun dari sebuah kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, juga komuniti lokal, dan kemitraan ini harus bergerak dinamis dan aktif sehingga memberikan

kemungkinan secara luas bagi terwujudnya komitmen dari sebuah tanggung jawab bersama secara sosial antar *stakeholders*. Tetapi tanggung jawab sosial ini tidak dapat serta merta diterapkan oleh korporat hal ini selain dikarenakan permasalahan global terlalu luas dan membutuhkan partisipasi yang besar pula tetapi bukan berarti tidak ada yang dapat dilakukan.

Lebih lanjut, keberadaan korporat dengan aktifitas bisnisnya sebenarnya sudah menjadi satu paket dengan tanggung jawab sosialnya. Sehingga korporat tidak dapat melepaskan dirinya dari lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan sosial masyarakat lokal dan lingkungan alamnya. Dengan rusaknya lingkungan sosial dan lingkungan alam dapat dipastikan akan mengganggu stabilitas produksi perusahaan atau bahkan menghentikannya. Seperti kasus luapan lumpur di Porong, Sidoarjo yang diakibatkan kesalahan dalam menjalankan usahanya. Dalam beberapa kajian yang dilakukan oleh para ahli, ada beberapa sudut pandang dalam memahami penyelenggaraan CSR. Dari sudut pandang hukum sudah sangat jelas bahwa ada undang-undang yang mengatur, yaitu UU No. 40 pasal 74 tahun 2007. Sedangkan dari sudut pandang moral dan etika sudah sangat jelas bahwa perusahaan harus berkontribusi secara konkrit pada lingkungan alam dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada dan secara bisnis, merupakan upaya untuk meningkatkan aset perusahaan sebagai buah dari investasi sosial (<http://ewepe.wordpress.com/2007/06/21/csr/>). Sehingga apabila ada *benefit* yang dihasilkan dari investasi ini adalah wajar, karena memang harusnya demikian ketika sebuah investasi dilakukan. Beberapa bentuk *benefit* yang

secara langsung dapat dirasakan adalah *good corporate imege* sedangkan secara tidak langsung dapat berupa dukungan sosial yang menciptakan kondisi yang efektif bagi operasionalisasi perusahaan. Dukungan sosial disini dapat dikatakan sebagai wujud kepercayaan masyarakat dan *stakeholders* lainnya. Kepercayaan inilah yang nantinya juga menjadi modal dasar agar perusahaan dapat terus menjalankan aktivitas usahanya.

Pengembangan konsep CSR sebagai investasi sosial juga diperkuat dengan konsteks CSR yang dikembangkan oleh John Elkington, 1997, yaitu dengan mengembangkan konsep *triple bottom line* dalam istilah *economic prosperity*, *environmental quality*, dan *social justice* ([www.keepandshare.com](http://www.keepandshare.com)). Sehingga dalam menjalankan usahanya, perusahaan seharusnya memperhatikan 3P, yaitu *profit*, *people*, dan *planet*. Sehingga menjadi sangat tidak benar apabila perusahaan hanya menjalankan fungsi *profit*-nya saja tanpa memperhatikan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan punya peran aktif dalam pelestarian lingkungan hidup. Dan ketiganya pun akan saling mendukung untuk memaksimalkan fungsinya masing-masing.

Lebih lanjut, bahwa konsep dari CSR sebagai investasi sosial adalah kemampuan CSR dalam memberdayakan masyarakat agar nantinya secara mandiri mampu menopang kehidupan ekonomi dan sosial secara bertahap dan berkelanjutan ([http://www.lpp.ac.id/berita\\_detail.php?act=view&id=232](http://www.lpp.ac.id/berita_detail.php?act=view&id=232)).

Keputusan untuk menjalankan program CSR merupakan keputusan sangat rasional yang bisa dijalankan oleh manajemen perusahaan. Karena



pada dasarnya CSR merupakan katub pengaman sosial (*social security*) yang mampu meningkatkan reputasi, meningkatkan citra perusahaan, posisi *merk* perusahaan maupun bidang usaha yang dijalankan ([http://www.arthagraha peduli.org/v2/agp.php?lang=id&menu=news\\_view&news\\_id=695](http://www.arthagraha peduli.org/v2/agp.php?lang=id&menu=news_view&news_id=695)). Dengan terjaganya investasi sosial pada hal lingkungan sosial dan alam maka akan menjamin keberlanjutan usaha dalam hal produksi sampai kepada proses pemasaran hasil produksi dan juga ketersediaan bahan baku produksi yang diambil dari alam.

#### **E. *Corporate Social Responsibility* sebagai Manifestasi *Community Relations***

Pada dasarnya dengan memperhatikan pada konsep CSR yang sudah dipaparkan pada bagian sebelumnya, CSR sebesar-besarnya memberikan kemanfaatan pada komuniti dalam bentuk pemberdayaan. Hal ini perlu untuk diberikan penekanan karena bukan berarti memanjakan komuniti dengan memfasilitasi sumber daya atau modal sosial komuniti sehingga komuniti keluar dari permasalahan sosialnya misalnya. Atau dalam contoh yang lebih sederhana, melakukan pemberdayaan masyarakat yang berangkat dari kemiskinannya dan kemudian terbebas dari kemiskinannya atau mampu memperbaiki kualitas kehidupannya. Hal ini tetap menjadi permasalahan masing-masing individu dan posisi korporat adalah sebagai fasilitator saja yang memberikan peluang atau kesempatan bagi komuniti untuk berpikir dan berbuat dalam memperbaiki kehidupan sosialnya. Sehingga kemandirian itu tetap menjadi tanggung jawab komuniti bukan korporat.

Ada beberapa manfaat yang dapat dicapai dari implementasi CSR ini menurut Untung (2008: 6-7), yaitu:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan.
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial.
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan.
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dengan dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*.
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

Dari kesepuluh manfaat yang didapat ketika CSR diimplementasikan merupakan wujud hasil dari komitmen korporat yang secara bertanggung jawab melibatkan dirinya dalam proses pembangunan. Sehingga, keberlanjutan pembangunan yang menjadi *mainframe* dari CSR itu seharusnya tidak parsial tetapi holistik.

Berikut beberapa prinsip tanggung jawab sosial korporat yang nantinya akan memberikan gambaran bagaimana korporat melalui PR-nya menjalankan tanggung jawab sosialnya melalui *community relations* (Iriantara, 2004: 59-60):

1. Prioritas korporat  
Dengan memahami bahwa tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama pembangunan berkelanjutan. Sehingga korporat bisa membuat kebijakan, program dan praktik dalam menjalankan operasi bisnisnya dengan cara bertanggung jawab secara sosial.
2. Manajemen terpadu  
Mengintegrasikan kebijakan, program, dan praktik ke dalam setiap kegiatan bisnis.

3. Proses perbaikan  
Secara berkesinambungan memperbaiki kebijakan, program dan kinerja sosial korporat, mempertimbangkan temuan riset mutakhir, dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara internasional.
4. Pendidikan karyawan  
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta memotivasi karyawan.
5. Kajian  
Selalu melakukan kajian dampak sosial sebelum memulai kegiatan atau proyek baru dan sebelum menutup satu fasilitas atau pabrik.
6. Produk dan jasa  
Mengembangkan produk dan jasa yang tidak berdampak negatif secara sosial.
7. Informasi publik  
Memberi informasi -bila diperlukan- mendidik pelanggan, distributor dan publik tentang penggunaan transportasi, penyimpanan, dan pembuangan produk; dan begitu juga halnya dengan jasa.
8. Fasilitas dan operasi  
Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan temuan kajian dampak sosial.
9. Penelitian  
Melakukan atau mendukung penelitian dampak sosial bahan baku, produk, proses, emisi, dan limbah yang terkait dengan kegiatan usaha dan penelitian pun menjadi sarana meminimalkan dampak negatif.
10. Prinsip pencegahan  
Memodifikasi manufaktur, pemasaran atau penggunaan produk atau jasa, sejalan dengan penelitian mutakhir, untuk mencegah dampak sosial yang negatif.
11. Kontraktor dan pemasok  
Mendorong penggunaan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial korporat dijalankan kalangan kontraktor dan pemasok dan -bila diperlukan- mempersyaratkan perbaikan dalam praktik bisnis yang dilakukan kontraktor dan pemasok.
12. Siaga menghadapi darurat  
Menyusun dan merumuskan rencana menghadapi keadaan darurat dan bila terjadi keadaan berbahaya berkerja sama dengan layanan gawat darurat, instalasi berwenang dan komunitas lokal. Sekaligus mengakui potensi bahaya yang muncul.
13. Alih-praktik yang baik  
Menyumbangkan pengembangan dan alih praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik.

14. Memberi sumbangan pada ikhtiar bersama  
Memberi sumbangan untuk pengembangan kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen pemerintah serta lembaga pendidikan yang akan meningkatkan kesadaran tentang tanggung jawab sosial.
15. Keterbukaan  
Menumbuhkembangkan keterbukaan dan dialog dengan pekerja dan publik, mengantisipasi dan memberi respon terhadap keprihatinan pekerja dan publik atas kemungkinan keadaan bahaya dan dampak operasi, produk, limbah atau jasa.
16. Pencapaian dan pelaporan  
Mengevaluasi kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria korporat dan peraturan perundang-undangan dan juga berdasarkan prinsip-prinsip ini, dan menyampaikan informasi ini kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja, dan publik.

Apabila melihat bagaimana prinsip-prinsip ini maka dapat dipahami bahwa peran PR sangatlah strategis dan vital bagi terlaksananya aktivitas usaha korporat. Prinsip-prinsip itu jugalah yang menjadi dasar dari munculnya kegiatan *community relations* yang seharusnya berkarakterkan hal-hal seperti berikut (Iriantara, 2004: 67):

1. Secara mendasar menunjukkan nilai-nilai dan misi perusahaan
2. Bersifat proaktif dan reaktif
3. Memiliki visi dan tujuan yang jelas
4. Didasari pengembangan program yang substantif
5. Melakukan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi
6. Mengharapkan bisa menghasilkan outcome dan dampak
7. Memiliki fokus yang terumuskan.

Dalam konteks *Public Relation*, tanggung jawab sosial korporat itu diimplementasikan dalam program dan kegiatan *community relations* atau dengan kata lain, kegiatan *community relations* merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (Iriantara, 2004:47). Bentuk-bentuk *community relations* dapat berupa renovasi sekolah, pemberian beasiswa, rehabilitasi lingkungan hidup atau membantu usaha kecil menengah dengan memberikan

jaringan pemasaran dan bantuan modal. Hal ini menjadi tantangan bagi PRO (*public relations officer*) yang lingkup perannya adalah menciptakan pemahaman yang resiprokal antara manajemen dan publiknya, dimana kegiatan *community relations* tidak lagi dapat terjawab atau memberikan solusi yang baik apabila hanya berkisar pada kegiatan *charity* tetapi pada kemampuan bermitra dengan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Sehingga salah satu perwujudan dari praktik PR adalah menjalin hubungan dengan komunitas.

#### **F. Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (PKBL)**

Pada hakikatnya, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah salah satu bentuk dari implementasi CSR. Namun, pada prakteknya, PKBL lebih banyak berfokus pada pemberian pinjaman ataupun mikro-kredit pada pengusaha kecil yang potensial. Misalnya, pemberian dana pinjaman pada komunitas pengrajin kulit, dan sebagainya. Seyogianya, hal ini menjadi kail bagi para pengusaha kecil untuk berkembang, sehingga mampu mengembalikan pinjaman yang diberikan, beserta keuntungan bagi usahanya. Sementara CSR mencakup bidang yang lebih luas dari mikro-kredit dan semacamnya. Baik secara ilmiah maupun praktis. Mulai dari aktivitas *charity* (seperti bantuan terhadap korban bencana alam), *voluntary activities*, *social marketing*, ataupun *philanthropy* dengan mendonasikan sejumlah dana pada aktivitas sosial tertentu. *Cause-related marketing*, dalam konteks tertentu,

juga dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk CSR. Biasanya hal ini dilakukan melalui program promosi, dengan sebagian hasil penjualan didonasikan untuk bantuan terhadap permasalahan sosial tertentu (PKBL [lxiwvu-apa-perbedaan-csr-dengan-pkbl.htm](#)).

PKBL adalah bentuk tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada masyarakat. PKBL dilaksanakan dengan dasar UU No.19 tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Menteri BUMN No. Per-05/MBU/2007 yang menyatakan maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

PKBL merupakan Program Pembinaan Usaha Kecil dan pemberdayaan kondisi lingkungan oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyesihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk Program Bina Lingkungan.

Secara konsep Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak jauh berbeda dengan *best practices* CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta sehingga dapat dikatakan bahwa PKBL merupakan praktek CSR yang dilakukan oleh BUMN. Peran PKBL BUMN mempunyai cakupan yang lebih luas dibanding praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan swasta karena PKBL- BUMN juga diharapkan untuk mampu mewujudkan 3 pilar utama

pembangunan (*triple tracks*) yang telah dicanangkan pemerintah dan merupakan janji politik kepada masyarakat, yaitu: (1) pengurangan jumlah pengangguran (*pro-job*), (2) pengurangan jumlah penduduk miskin (*propoor*) dan (3) peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*). Melalui PKBL diharapkan terjadi peningkatan partisipasi BUMN untuk memberdayakan potensi dan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat dengan fokus diarahkan pada pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menciptakan pemerataan pembangunan.

Dalam sejarah perkembangan manusia, manusia tidak bisa lepas dari kelompok manusia yang lainnya walaupun ada itu karena terpaksa dan hanya untuk sementara waktu, karena pada hakikatnya manusia itu sendiri merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Hasrat untuk hidup bersama sudah menjadi pembawaan dari manusia, karena setiap manusia mempunyai kepentingan dan tujuan masing-masing maka kepentingan tersebut terkadang searah dan sejalan maka dari itu manusia melakukan hubungan kerjasama agar tujuan yang ingin dicapai dapat berjalan lebih mudah serta lekas tercapai antara yang satu dengan yang lainnya. Akan tetapi seringkali kepentingan-kepentingan itu juga bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan pertentangan dan perselisihan diantara mereka yang berakibat pertikaian yang akan mengganggu keselarasan kehidupan bersama. Maka dari itu didalam masyarakat yang teratur terdapat suatu aturan hukum, kaidah dan peraturan-peraturan yang lain di dalam kehidupan bermasyarakat.

Di dalam suatu kemitraan juga ada hukum yang mengatur masalah kemitraan. Hukum tersebut bertujuan untuk memberikan rambu-rambu di dalam pelaksanaan kemitraan agar dapat memberikan dan menjamin keseimbangan di dalam pelaksanaan kemitraan. Di antaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil

Undang-Undang ini lahir untuk memberikan landasan hukum (yuridis) bagi pemberdayaan usaha kecil, sebab dalam pembangunan nasional usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Salah satu cara/upaya dalam rangka pemberdayaan usaha kecil adalah dengan kemitraan.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Dengan Syarat Kemitraan

Keputusan Presiden ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberdayakan dan memberikan peluang berusaha kepada usaha kecil agar mampu mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan nasional. Keppres tertanggal 14 Juli 1998 ini memuat delapan pasal yang



menjabarkan bidang-bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil antara lain bidang pertanian, perkebunan, peternakan, periklanan, industri makanan atau minuman, industri tekstil dan industri percetakan.

#### 4. Definisi Kemitraan

- a. Menurut Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 1 angka 8. “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar, disertai pembinaan dan Pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.
- b. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan, Pasal 1 angka 1. “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa suatu kemitraan itu adalah suatu hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang dapat saling membantu dengan tujuan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Dengan begitu diharapkan adanya pembinaan dan pengembangan dari pengusaha besar dengan pengusaha kecil yang saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

## 5. Prinsip-prinsip Kemitraan

Menurut Mariotti dalam Jafar (1999:51) ada tiga prinsip kemitraan yang menjadikan suatu pengusaha tertarik melakukan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak ekonomi lainnya, yaitu prinsip saling memerlukan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip saling memperkuat.

### a. Prinsip Saling Memerlukan

Merupakan suatu rangkaian proses yang dimulai dengan mengenal calon mitranya, mengetahui posisi keunggulan dan kelemahan usahanya. Pemahaman akan keunggulan yang ada akan menghasilkan sinergi yang berdampak pada efisiensi, turunya biaya produksi. Penerapannya dalam kemitraan, perusahaan besar dapat menghemat tenaga dalam mencapai target tertentu dengan menggunakan tenaga kerja yang dimiliki oleh perusahaan kecil. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, yang umumnya relatif lemah dalam hal kemampuan teknologi, permodalan dan sarana produksi dapat melalui teknologi dan sarana produksi yang dimiliki oleh perusahaan besar. Dengan demikian sebenarnya ada saling memerlukan atau ketergantungan diantara kedua belah pihak yang bermitra.

### b. Prinsip Saling Menguntungkan

Salah satu tujuan dan maksud dari kemitraan usaha adalah “*win-win solution partnership*” kesadaran dan saling menguntungkan. Pada

kemitraan ini suatu partisipan harus mempunyai kemampuan dan kekuatan yang sama akan tetapi esensi yang lebih diutamakan, maksudnya adalah adanya posisi tawar yang setara dengan perannya masing-masing. Pada kemitraan usaha adanya peranan timbal balik, bukan seperti kedudukan antara buruh dan majikan tetapi lebih kepada adanya pembagian resiko dan keuntungan secara proporsional dengan kedudukan yang setara. Dengan adanya kesamaan derajat dalam bermitra usaha maka tidak adanya pihak yang tereksplotasi dan dirugikan dari proses hubungan ini, dengan begitu terciptanya rasa saling percaya antara kedua pihak sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan atau pendapatan melalui pengembangan usahanya.

c. Prinsip Saling Menguatkan

Dalam mitra-usaha sebelum kedua belah pihak melakukan hubungan kerjasama pasti ada suatu nilai tambah yang ingin di raih oleh masing-masing mitra. Nilai tambah ini selain dalam bentuk nilai ekonomi (peningkatan modal dan keuntungan, perluasan pangsa pasar) tapi ada juga dalam bentuk non ekonomi (peningkatan kemampuan manajemen, penguasaan teknologi, dan kepuasan tertentu). Keinginan ini merupakan konsekuensi logis yang ada dari hubungan suatu kemitraan. Dengan adanya motivasi ekonomi tersebut maka prinsip kemitraan dapat didasarkan untuk saling memperkuat.

## 6. Unsur-Unsur Kemitraan

Pada dasarnya kemitraan merupakan kegiatan yang saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat antara satu sama lainnya. Julius Bobo, (2003.183) tujuan utama suatu kemitraan adalah untuk mengembangkan pembangunan yang mandiri dan berkelanjutan dengan landasan dan struktur perekonomian yang kukuh dan berkeadilan dengan ekonomi rakyat sebagai tulang punggungnya. Berkaitan dengan kemitraan ini, ada beberapa unsur yang merupakan pokok dari usaha kerjasama berdasarkan prinsip saling menguatkan, saling menguntungkan dan saling memerlukan, yaitu:

### a. Kerjasama Usaha

Jalinan kerjasama yang dilakukan antara usaha besar atau menengah dengan usaha kecil didasarkan pada kesejajaran kedudukan atau mempunyai derajat yang sama terhadap kedua belah pihak yang bermitra. Ini berarti bahwa hubungan kerjasama yang dilakukan antara pengusaha besar atau menengah dengan pengusaha kecil mempunyai kedudukan yang setara dengan hak dan kewajiban timbal balik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, tidak ada yang saling mengeksploitasi satu sama lain dan tumbuh berkembangnya rasa saling percaya di antara para pihak dalam mengembangkan usahanya

b. Antara Pengusaha Besar dan Pengusaha Kecil

Dengan hubungan kerjasama melalui kemitraan ini diharapkan pengusaha besar dapat menjalin hubungan kerjasama dengan pengusaha kecil atau pelaku ekonomi lainnya, sehingga pengusaha kecil dapat lebih berdaya dan tangguh demi mencapai kesejahteraan.

c. Pembinaan dan Pengembangan

Pada dasarnya yang membedakan hubungan kemitraan dengan hubungan dagang biasa oleh pengusaha kecil dengan pengusaha besar adalah adanya bentuk pembinaan dari pengusaha besar terhadap pengusaha kecil atau koperasi yang tidak ditemukan pada hubungan dagang biasa. Bentuk pembinaan dalam kemitraan antara lain pembinaan didalam mengakses modal yang lebih besar, pembinaan manajemen usaha, pembinaan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), pembinaan manajemen produksi, pembinaan mutu produksi serta menyangkut pula pembinaan didalam pengembangan aspek institusi kelembagaan, fasilitas alokasi serta investasi.

7. Bentuk Program Kemitraan

- a. Pemberian pinjaman untuk modal kerja dan/atau pembelian Aktiva Tetap Produktif;
- b. Pinjaman khusus bagi UMK yang telah menjadi binaan yang bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UMK Binaan.

- c. Program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) UMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan/pelatihan, pemagangan, dan promosi.
- d. *Capacity Building* diberikan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Dana *capacity building* bersifat hibah dan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan UMK Binaan.

#### 8. Program Bina Lingkungan

Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, yaitu program untuk membentuk calon Mitra Binaan baru dan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Ruang lingkup program bina lingkungan :

- a. Bantuan korban bencana alam
- b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan
- c. Bantuan peningkatan kesehatan
- d. Bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana
- e. Bantuan sarana ibadah
- f. Bantuan pelestarian alam.

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Maka yang dimaksud Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil (Program Kemitraan)

adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Berdasarkan peraturan ini, PKBL wajib dilaksanakan oleh seluruh BUMN, baik yang berbentuk Perum maupun Persero.

Dana yang digunakan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini sebagaimana dijelaskan pada Bab III Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Nomor Per-05/MBU/2007, bersumber dari:

1. Penyisihan laba BUMN setelah pajak yang nilainya maksimal sebesar 2% (dua persen);
2. Jasa administrasi pinjaman / marjin / bagi hasil, bunga deposito dan / atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
3. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

Selanjutnya, dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dijelaskan pada Bab III Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Nomor Per-05/MBU/2007 adalah digunakan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Dana Program Kemitraan
  - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
  - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan;
  - c. Beban Pembinaan:
    - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian / penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;

- 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
  - 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
2. Dana Program Bina Lingkungan
- a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisasi, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisasi serta pendapatan lainnya.
  - b. Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program Bina Lingkungan yang tersedia dapat disalurkan melalui Program Bina Lingkungan BUMN Pembina.
  - c. Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program Bina Lingkungan yang tersedia diperuntukkan bagi Program Bina Lingkungan BUMN Peduli.
  - d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program Bina Lingkungan BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program Bina Lingkungan tahun berikutnya.
  - e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina:
    - 1) Bantuan korban bencana alam;
    - 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
    - 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
    - 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
    - 5) Bantuan sarana ibadah;
    - 6) Bantuan pelestarian alam;
  - f. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Peduli ditetapkan oleh Menteri.

Adapun mekanisme penyaluran dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagaimana dijelaskan pada Bab IV Pasal 12 Peraturan Menteri Negara Nomor Per-05/MBU/2007 adalah sebagai berikut:

1. Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan:
  - a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur, dengan memuat sekurang-kurangnya data sebagai berikut:
    - 1) Nama dan alamat unit usaha;
    - 2) Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha;
    - 3) Bukti identitas diri pemilik/pengurus;



- 4) Bidang usaha;
  - 5) Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang;
  - 6) Perkembangan kinerja usaha ( arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha); dan
  - 7) Rencana usaha dan kebutuhan dana.
- b. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan;
  - c. Calon Mitra Binaan yang layak bina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur bersangkutan;
  - d. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang sekurang-kurangnya memuat:
    - 1) Nama dan alamat BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
    - 2) Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dan Mitra Binaan;
    - 3) Jumlah pinjaman dan peruntukannya;
    - 4) Syarat-syarat pinjaman (jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman).
  - e. BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina atau BUMN Penyalur atau Lembaga Penyalur lain.
2. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan per tahun sebesar 6% (enam persen) dari limit pinjaman atau ditetapkan lain oleh Menteri.
  3. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar 6% (enam persen) atau sesuai dengan penetapan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas.
  4. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (10 : 90) sampai dengan maksimal 50% (50 : 50).
  5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga terhadap rasio bagi hasil untuk BUMN Penyalur dan Lembaga Penyalur.

Dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini, diperlukan suatu penilaian dalam mengukur keberhasilan program, untuk itu diperlukan suatu indikator dalam mengukurnya. Dadang Solichin (2008)

menerangkan bahwa dalam pencapaian sasaran kerja yang optimal harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan tujuan-tujuan akhir yang dikehendaki; sasaran tersebut; masalah-masalah yang dihadapi; modal atau sumber daya akan digunakan serta pengalokasiannya; dan mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya sangat penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metode juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Dengan pengetahuan atas sesuatu, maka tersedianya jawaban bagi manusia untuk pemecahan suatu masalah.

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus menggunakan metode penelitian yang tepat agar penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode penelitian tersebut diperlukan untuk mendapatkan data dan informasi yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti dimana metode penelitian tersebut berguna dalam pengumpulan dan penemuan data, analisa dan interpretasi data. Oleh karena itu metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah dan kegiatan dan memudahkan dalam pencapaian tujuan.

### A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan deskripsi untuk interpretasi data dan metode kualitatif untuk menganalisis masalah. Data deskripsi adalah metode interpretasi data dengan cara menggambarkan atau menguraikan apa adanya tanpa membuat kesimpulan dalam bentuk prediksi, manipulasi atau penjelasan argumentatif, maupun pengendalian persepsi. Sedangkan metode kualitatif adalah metode analisis data tanpa menggunakan perkiraan dalam bentuk nilai atau angka, melainkan dalam bentuk simbol (bahasa, kata-kata) yang dilakukan oleh peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian. Dengan demikian penelitian ini hanya menjelaskan atau mendeskripsikan bagaimana program kemitraan dan bina lingkungan sebagai *corporate social responsibility* Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar.

### B. Fokus Penelitian

Berdasarkan kerangka teori, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan yang diselenggarakan oleh Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan terhadap masyarakat sekitar.

3. Dampak program kemitraan dan bina lingkungan sebagai *corporate social responsibility* terhadap masyarakat sekitar.

### C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Warga Griya Indah Jombang Kabupaten Jombang dan Pabrik Gula Djombang Baru. Alasan pemilihan lokasi dengan pertimbangan bahwa warga tersebut paling sering menerima program kemitraan dan bina lingkungan sebagai *corporate social responsibility* Pabrik Gula Djombang Baru.

### D. Sumber Data

Informan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Karyawan Pabrik Gula Djombang Baru

Pada penelitian ini mengacu pada karyawan yang berkaitan langsung dengan program kemitraan dan bina lingkungan sebagai *corporate social responsibility*.

2. Penerima program kemitraan dan bina lingkungan sebagai *corporate social responsibility*

Untuk informan penerima program kemitraan dan bina lingkungan sebagai *corporate social responsibility* yang ditetapkan adalah ketua RT dan RW 01 Griya Indah Jombang Kelurahan Jombang.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang artinya adalah kegiatan mengumpulkan data yang sistematis mengenai cara pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan sebagai *corporate social responsibility* Pabrik Gula Djombang Baru. Teknik yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Percakapan peneliti dan informan. Wawancara yang digunakan adalah interview guide/panduan wawancara. Wawancara ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan dengan :

#### a. Kepala Bidang PKBL Pabrik Gula Djombang Baru (Wasis Pramono)

Informan adalah salah satu pengurus yang berdasarkan Surat Keputusan Direksi menjabat sebagai Kepala Bidang PKBL.

#### b. Ibu Suryati

Informan adalah salah satu penerima Pasar murah BUMN.

#### c. Bapak Gunawan

Informan adalah salah satu penerima bantuan bina lingkungan kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak limbah dan sebagai bentuk kepedulian Pabrik Gula Djombang Baru.

#### d. Bapak Achmad dan Rokhim, merupakan penerima bantuan pinjaman.

#### e. Ibu Wiwik, adalah salah satu penerima pengobatan gratis.

## 2. Pengamatan

Pada teknik ini peneliti melakukan pengamatan langsung bagaimana pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan sebagai *corporate social responsibility* Pabrik Gula Djombang Baru.

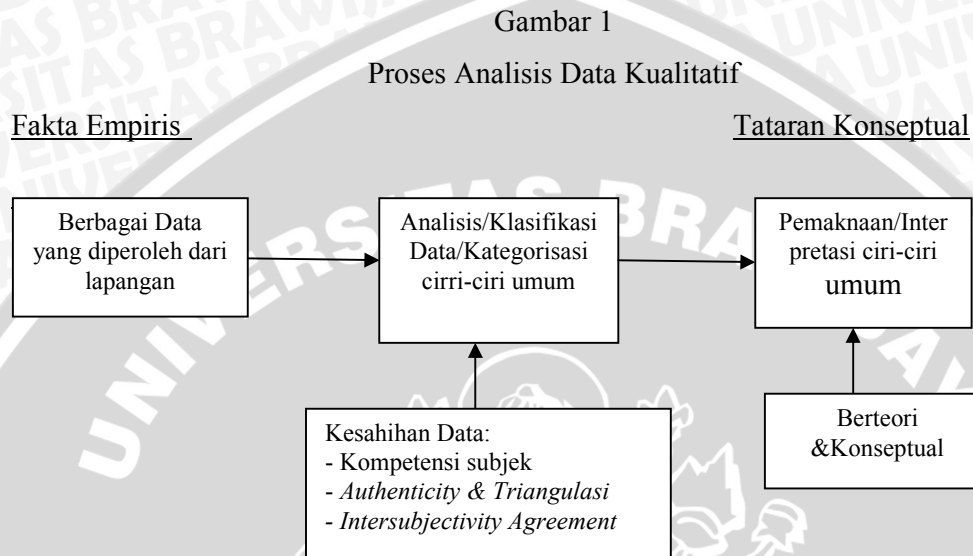
## 3. Dokumentasi

Dokumentasi sebagai metode pengumpulan data dengan mendokumentasikan gambaran tentang program kemitraan dan bina lingkungan. Dalam hal ini data yang dikumpulkan dari Pabrik Gula Djombang Baru adalah berupa profil perusahaan, struktur organisasi dan sebagainya.

## F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2006:248). Inti analisis terletak pada 3 proses yang berkaitan, yaitu : mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan lainnya berkaitan (Moleong, 2006:289). Lebih fokusnya, peneliti menggunakan teknik *filling system*, yaitu data hasil dari penelitian akan dianalisis dengan membuat kategori-kategori tertentu. Setelah

itu data akan diinterpretasikan dengan memadukan konsep-konsep atau teori-teori tertentu (Kriyantono, 2006 :149).



### G. Keabsahan Data

Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik *Truswothiness*, yaitu menguji realitas menurut apa yang dialami, dirasakan, atau dibayangkan (Kriyantono, 2007:71). Triangulasi yang digunakan peneliti, yaitu triangulasi dengan metode. Triangulasi adalah uji keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data (Moleong, 2000:128). Maksudnya peneliti menggunakan teknik ini untuk mengetahui apakah semua program kemitraan dan bina lingkungan dilaksanakan dengan baik dan benar bahwa Pabrik Gula



Djombang Baru memiliki program kemitraan dan bina lingkungan dengan cara melakukan wawancara.

Langkah selanjutnya dilakukan perpanjangan kehadiran peneliti di lokasi penelitian. Teknik ini dilaksanakan sebagai upaya untuk melengkapi data-data penelitian yang dirasa perlu. Pada teknik ini peneliti datang kembali ke lokasi dalam bentuk observasi ataupun wawancara tambahan. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap data peneliti melakukan teknik keabsahan data. Keabsahan data penelitian menurut Moloeng (2000:54) dilihat dari :

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)  
Yaitu mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.
2. Keteralihan (*Transferability*)  
Yaitu peneliti hendaknya mencari dan mengumpulkan kejadian empiris tentang kesamaan konteks dan bertanggung jawab untuk menyediakan data deskriptif secukupnya jika ingin membuat keputusan tentang pengalihan tersebut. Dimana peneliti mencari informasi dan mendeskripsikan gambaran dan temuannya yang diperoleh di lapangan secara terinci.
3. Ketergantungan (*Dependability*)  
Yaitu konsep ketergantungan lebih luas dari pada reliabilitas. Hal tersebut disebabkan oleh peninjauannya dari segi bahwa konsep itu memperhitungkan segala-segalanya, yaitu ada pada reliabilitas itu sendiri ditambah faktor-faktor lainnya yang tersangkut pada apa yang diteliti.
4. Kepastian (*Confirmability*)  
Yaitu pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak tergantung pada persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat, atau penemuan seseorang. Dapat dikatakan bahwa pengalaman seseorang itu subjektif sedangkan jika disepakati oleh beberapa orang atau banyak orang, barulah dapat dikatakan objektif.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Perusahaan

###### a. Sejarah Perusahaan

Pabrik Gula Djombang Baru berdiri sejak tahun 1895. Dalam sejarahnya Pabrik Gula Djombang Baru ini mempunyai dua periode yaitu periode sebelum diambil alih dan sesudah diambil alih oleh pemerintah Indonesia. Pada periode sebelum diambil alih Pabrik Gula Djombang Baru dimiliki oleh Belanda atas nama ANEMAET & CO. Setelah itu pada tahun 1957 diambil alih oleh pemerintah Indonesia, maka Pabrik Gula Djombang Baru digolongkan dalam pengawasan PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) baru pusat dengan cabang-cabang di Jawa Timur yaitu unit gula di tiap daerah bekas karesidenan. Pada tahun 1963 terjadi reorganisasi PPN dengan Peraturan Pemerintah nomor 1 dan 2 tahun 1963 yaitu di pusat dibentuk BPU-PPN gula, di Jawa Timur diubah menjadi penasehat BPU-PPN Jawa Timur, di bekas karesidenan diubah menjadi kantor Direksi, di pabrik gula menjadi Badan Hukum yang dipimpin oleh Direktur Pimpinan Pabrik Gula.

Pada periode tahun 1968 sampai 1973 dengan Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 1968, BPU-PPN gula dibubarkan dan di daerah-daerah dibentuk Direksi PN Perkebunan yang berbadan hukum

sendiri antara lain PN Perkebunan XXI untuk pabrik gula bekas karesidenan Kediri dan PN Perkebunan XXI-XXII pabrik gula bekas karesidenan Surabaya.

Berdasarkan akte notaris Lumban Tobing nomor 48 pada tanggal 31 Desember 1973 dan nomor 68 pada tanggal 30 Januari 1974 PT. Perkebunan XXI-XXII (Persero) didirikan. Persero ini bertujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan nasional pada umumnya, dan di sektor pertanian pada khususnya. Untuk mencapai tujuan seperti di atas, Persero menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, perkebunan dan industri (khususnya industri gula) dalam arti yang seluas-luasnya.

Dalam rangka menyederhanakan manajemen perusahaan, maka pada tahun 90-an PTP. XXI-XXII berubah menjadi PTPN X yang saat ini berkantor pusat di Jalan Jembatan Merah No. 3-5 Surabaya.

b. Lokasi Perusahaan

Lokasi pabrik merupakan faktor yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan suatu pabrik Pabrik Gula Djombang Baru terletak di Desa Pulo Lor Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, tepatnya di Jalan Panglima Sudirman No. 1 Jombang.

Pada waktu pendirian Pabrik Gula Djombang Baru Jombang telah mempertimbangkan faktor yang nantinya akan menunjang kelancaran dari perusahaan tersebut, faktor-faktor tersebut antara lain :

### 1) Bahan baku

Bahan baku pabrik gula ini adalah tebu yang diperoleh dari petani di sekitar pabrik yang merupakan daerah pertanian, di samping itu pabrik juga memberikan kredit kepada para petani sehingga hal ini akan menambah hasrat petani untuk menanam tebu.

### 2) Penyediaan air

Adanya sumber air yang debitnya cukup besar, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pabrik tersebut dalam menjalankan operasinya. Dalam hal ini air berfungsi sebagai air proses, air pendingin, air sanitasi dan air pengisian ketel.

### 3) Tenaga kerja

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja baik staf maupun non staf mudah diperoleh. Tenaga kerja staf diatur oleh Direksi. Sedangkan untuk tenaga kerja non staf diperoleh dari penduduk sekitar pabrik, sehingga tidak mengalami kesulitan bila sewaktu-waktu dibutuhkan.

### 4) Transportasi

Transportasi juga merupakan hal yang penting dalam menentukan lokasi perusahaan. Hal ini berhubungan dengan sarana pengangkutan hasil produksinya. Transportasi untuk Pabrik Gula Djombang Baru mudah didapat, karena Pabrik Gula Djombang Baru terletak di pinggir jalan raya Jombang – Surabaya.

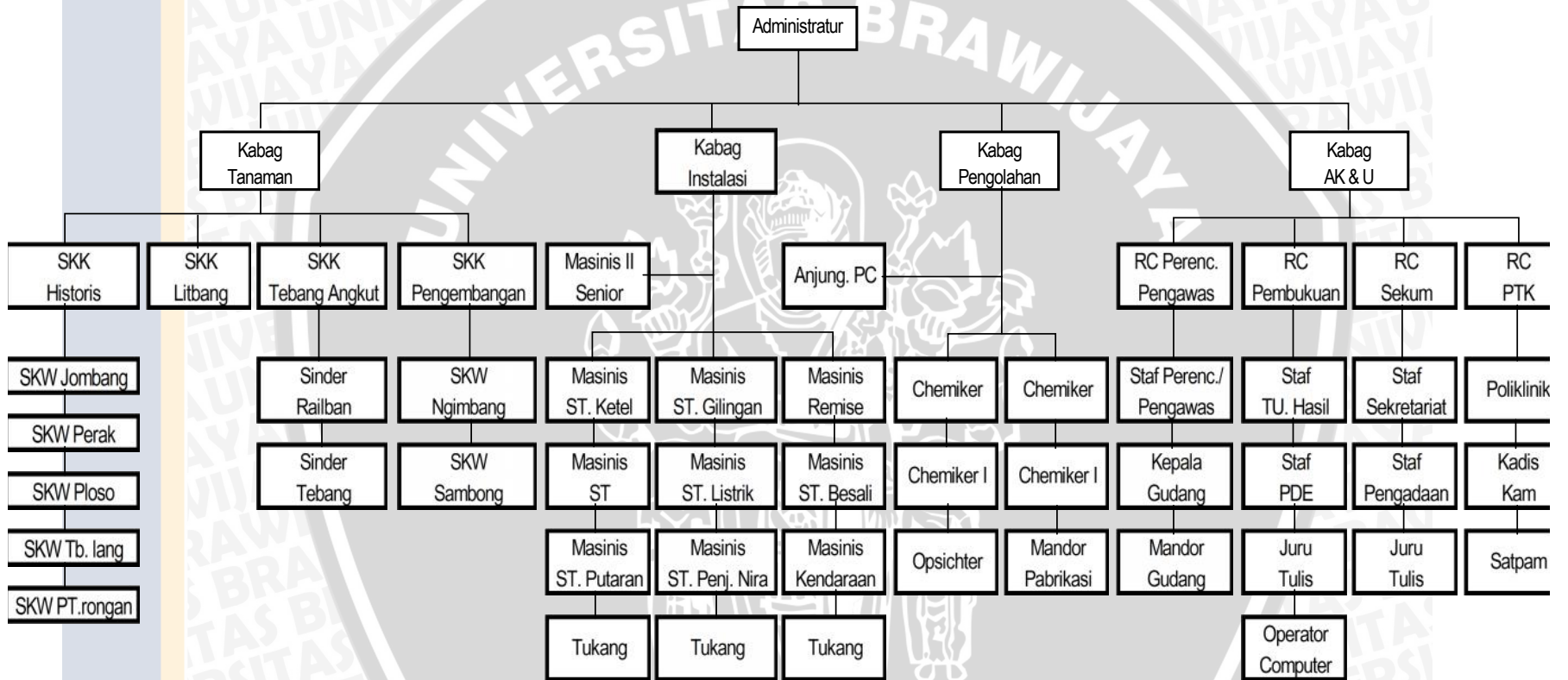
## 2. Struktur Organisasi

Untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah direncanakan maka satu perusahaan harus mempunyai struktur organisasi. Pabrik Gula Djombang Baru merupakan persero di bawah naungan PTPN X yang berkantor pusat di jalan Jembatan Merah No. 3-5 Surabaya. Pimpinan tertinggi adalah Administratur sebagai wakil Direksi dari kantor pusat. Administratur diwakili oleh seorang wakil yaitu Kepala Bagian Tanaman yang sewaktu-waktu dapat mengganti tugas lain. Administratur membawahi empat Kepala Bagian yang meliputi : Kepala Bagian Tanaman, Instalasi, Pengolahan dan Kepala Bagian AKU (Administrasi Keuangan dan Umum).

Struktur organisasi Pabrik Gula Djombang Baru dilihat dari hubungan kerja serta pembagian wewenang dan tanggung jawab adalah berbentuk organisasi garis. Pada organisasi ini wewenang atau perintah dari puncak pimpinan memancar ke bawah vertikal tanpa dibatasi oleh fungsi-fungsi tertentu.

Adapun bentuk struktur organisasi Pabrik Gula Djombang Baru adalah sebagai berikut :

Gambar 2  
Struktur Organisasi Pabrik Gula Djombang Baru



Sumber data : Dokumen Pabrik Gula Djombang Baru, 2012.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing jabatan sebagai berikut :

a. Administratur

Administratur sebagai pimpinan tertinggi di pabrik gula mempunyai jabatan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan dan mengamankan program kegiatan secara keseluruhan yang telah ditetapkan oleh Direksi dalam pengelolaan pabrik gula.
- 2) Memimpin dan mengkoordinir tugas pada Kepala Bagian agar terdapat kesatuan tindakan dalam melaksanakan kegiatan operasional yang terpadu guna mencapai target produksi secara efektif dan efisien.
- 3) Mengelola serta mempertanggungjawabkan sumber daya manusia, sumber dan peralatan pabrik sesuai dengan norma yang berlaku.
- 4) Bertanggung jawab atas semua tugas dari masing-masing bagian yang ada di perusahaan.
- 5) Memelihara keharmonisan dalam hubungan kerja dan pelaksanaan kegiatan perusahaan sehari-hari dan mempertahankan kesejahteraan karyawan.
- 6) Mewakili perusahaan dalam melakukan hubungan keluar dengan instalasi lain.
- 7) Bertanggung jawab kepada Direksi atas kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan di pabrik gula.

## b. Kepala Bagian Tanaman

Kepala Bagian Tanaman mempunyai tugas pokok menjalankan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh administrator, mengkoordinir semua tugas bagian tanaman dan bertindak sebagai wakil administrator apabila tidak ada di tempat. Demi kelancaran tugas dibantu oleh beberapa bagian antara lain :

### 1) Sinder Kebun Kepala Bagian

Sinder Kebun Wilayah membantu Kepala Bagian Tanaman mempunyai tugas dan wewenang antara lain :

- a) Mengkoordinir semua tugas sinder kebun wilayah sesuai dengan tanggung jawabnya.
- b) Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran perusahaan bagian tanaman.
- c) Menghimpun data dan informasi untuk kepentingan di bagian tanaman dan menjamin penyediaan tebu dari rayon sesuai dengan rencana.

### 2) Sinder Kebun Kepala Angkutan

Sinder Kebun Kepala Angkutan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- a) Melaksanakan dan membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran perusahaan dalam bidang angkutan, tebaran untuk tebu milik sendiri.



- b) Menjamin kelancaran penyediaan tebu dalam musim giling agar giling dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kapasitas giling.
- c) Di luar masa giling mengadakan perbaikan dan pembenahan wilayah emplasemen untuk persiapan giling yang akan datang.
- d) Mengatur pelaksanaan tebang atau jadwal tebang sesuai dengan kemasakan masa tanam tebu.

### 3) Sinder Kebun Wilayah

Tugas dan tanggung jawabnya antara lain :

- a) Melaksanakan *policy administrasi cq.* Kepala Bagian Tanaman dan Sinder Kebun Wilayah baik untuk kegiatan tanaman maupun untuk tebang angkut tebu.
- b) Mengadakan penyuluhan bagi para petani tebu rakyat di wilayah kerja untuk mencari pemasukan areal tanaman tebu.
- c) Memberikan bimbingan kepada para petani tebu rakyat mengenai cara tanam yang baik agar produksi tebu dapat tinggi.
- d) Mengembangkan tanaman tebu rakyat intensifikasi meliputi Tebu Rakyat Intensifikasi non Kredit (TRIK) dan Tebu Rakyat Intensifikasi non Kredit (TRIP dan TRIN) sesuai dengan INPRES No. 9/1975.
- e) Mengatur tebang angkut tebu di wilayahnya, mulai dari penentuan jadwal tebang sampai pelaksanaan penebangan sesuai jadwal tebang sampai pelaksanaan penebangan sesuai dengan besar kecilnya bagian yang telah ditentukan wilayah.

#### c. Kepala Bagian Instalasi

Kepala Bagian Instalasi mempunyai tugas dan tanggung jawab semua kegiatan yang ada di bagian instalasi termasuk kelancaran jalannya proses produksi dengan mengadakan pemeliharaan dan pengaduan alat-alat yang diperlukan dalam proses produksi.

Adapun tugas dan tanggung jawabnya meliputi antara lain :

- 1) Melaksanakan *policy* administrasi tentang pelaksanaan jalannya proses produksi.
- 2) Membuat rencana kerja serta rencana kebutuhan anggaran perusahaan untuk keperluan bagian instalasi, yaitu biaya pemeliharaan mesin-mesin dan perlengkapan dalam satu tahun.
- 3) Mengusahakan bekerjanya seluruh instalasi pabrik untuk menjamin kelancaran jalannya produksi (termasuk penyediaan air, penggunaan uap dan lain-lain).
- 4) Membina kerja sama yang baik antar bagian, mengingat proses produksi dilakukan terus menerus dalam musim giling. Apabila terjadi kerusakan salah satu mesin akan menghentikan kegiatan proses produksi secara keseluruhan.

#### d. Kepala Bagian Pengolahan

Kepala Bagian Pengolahan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang ada di bagian pengolahan menjadi :

- 1) Melaksanakan *policy* administrasi tentang pelaksanaan operasional di bagian pengolahan.

- 2) Menyusun rencana kebutuhan anggaran perusahaan untuk bagian pengolahan selama satu tahun.
- 3) Melaksanakan pembinaan kerjasama yang baik dalam proses pengolahan bahan baku tebu sehingga menjadi gula yang sesuai standar yang telah ditentukan.
- 4) Mengusahakan adanya kerjasama dengan bagian instalasi yaitu masinis kegiatan proses pengolahan gula dapat dengan lancar, efektif dan efisien.
- 5) Menghimpun data dan informasi dalam meningkatkan pengendalian dan mengadakan evaluasi mengenai besarnya biaya pengolahan sehingga dapat ditekan biaya produksi. Kepala Bagian Pengolahan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh beberapa chemica atau dokter gula.

e. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum

Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijaksanaan dari administrasi dan mengkoordinir semua kegiatan yang ada bagian administrasi keuangan dan umum. Untuk kelancaran tugas yang ada di bagian administrasi keuangan dan umum dibagi dalam beberapa bagian, yaitu :

- 1) Bagian perencanaan dan pengawasan mempunyai tugas :
  - a) Mengkoordinir dalam penyusunan rencana kebutuhan anggaran perusahaan dari seluruh bagian

- b) Merencanakan kebutuhan penggunaan sumber dana atas dasar anggaran.
  - c) Mengadakan pengawasan dan pengendalian atau penggunaan sumber dana.
  - d) Membuat laporan atas penggunaan sumber dana atau realisasi modal kerja.
- 2) Bagian Pembukuan mempunyai tugas :
    - a) Membukukan semua transaksi secara harian yang terjadi di perusahaan baik secara kas atau tunai maupun non kas yaitu mengenai penggunaan barang dan hasil produksi perusahaan.
    - b) Membuat laporan keuangan secara periode (bulan) dalam bentuk neraca dan laporan manajemennya.
  - 3) Bagian Sekretaris dan Umum mempunyai tugas :
    - a) Menyelesaikan persuratan baik surat yang keluar maupun masuk dalam bentuk ekspedisi.
    - b) Melakukan pengarsipan semua surat-surat atau dokumen.
    - c) Memproses administrasi pengadaan bahan atau barang untuk kebutuhan pabrik sesuai produksi.
  - 4) Bagian Personalia mempunyai tugas :
    - a) Merencanakan kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan standart informasi yang ada.
    - b) Mengadakan pembinaan tenaga kerja melalui pendidikan, kursus, latihan training.

- c) Melakukan pembayaran yang menjadi hak-hak karyawan, yaitu pembayaran gaji, upah dan santunan.
- d) Membuat laporan secara periode mengenai posisi tenaga kerja dan biaya yang telah dibayarkan pada karyawan.
- 5) Bagian Gudang mempunyai tugas :
  - a) Menerima barang atas dasar pengadaan yang dibutuhkan masing-masing bagian.
  - b) Menyimpan barang-barang dalam gudang sesuai jenis barang dan dicatat dalam tabel gudang.
  - c) Membukukan atas penerimaan dan pengeluaran barang yaitu dipakai dalam buku gudang.
  - d) Membuat laporan posisi persediaan barang yang ada di gudang setiap periode.
  - e) Mengadakan *stock opname* persediaan barang pada akhir tahun.

### 3. Personalia

Adapun personalia pada Pabrik Gula Djombang Baru Jombang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut :

#### a. Karyawan staf

Karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu.

#### b. Karyawan non staf, terdiri dari :

##### 1) Karyawan tetap

Karyawan yang mempunyai hubungan dengan perusahaan untuk jangka waktu yang ditentukan. Karyawan tetap terdiri dari :

##### a) Karyawan tetap bulanan

b) Karyawan tetap harian

2) Karyawan tidak tetap

Karyawan yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Pada saat permulaan hubungan kerja melalui masa percobaan.

Karyawan tidak tetap terdiri dari :

a) Karyawan honorer

Karyawan yang bekerja pada waktu tertentu dengan sistem kontrak. Karyawan ini mendapat upah secara harian atau bulanan.

b) Karyawan kampanye

Karyawan yang bekerja hanya dalam masa giling dan terlibat langsung dengan proses pembuatan gula. Karyawan ini mendapat upah secara harian atau bulanan.

c) Karyawan musiman

Karyawan yang bekerja hanya dalam satu musim dan tidak berhubungan dengan proses pembuatan gula.

Karyawan musiman ini dibedakan menjadi tiga :

(1) Karyawan musiman tanaman

Karyawan yang melaksanakan pekerjaannya mulai dari pembukaan tanah, persiapan tanah, pemeliharaan tebu sampai pada tebu siap tebang, karyawan ini mendapat upah secara harian, bulanan atau borongan.

(2) Karyawan musiman tebang

Karyawan yang melaksanakan pekerjaan mulai dari tebu ditebang sampai dengan tebu diangkut. Karyawan ini mendapat upah harian, bulanan, atau borongan.

(3) Karyawan lain-lain

Karyawan yang bekerja diemplasemen yang tidak ada hubungan langsung dengan penggilingan tebu. Karyawan ini mendapat upah harian, upah bulanan atau borongan.

d) Karyawan borongan

Karyawan yang melakukan pekerjaan yang bersifat diborongan dengan upah borongan.

e) Karyawan harian lepas

Karyawan yang hanya bekerja bila ada suatu pekerjaan tertentu dan bisa berhenti sewaktu-waktu bila pekerjaan sudah dianggap selesai. Karyawan ini mendapat upah berdasarkan hari-hari karyawan bekerja.

Tabel 1

Jumlah Tenaga Kerja  
Pabrik Gula Djombang Baru Jombang  
Tahun 2012

No	Jenis Jabatan	Jumlah (orang)
1	Karyawan Staf	34
2	Karyawan non staf	
	a. Karyawan tetap	
	- Karyawan tetap bulanan	31
	- Karyawan tetap harian	104
	b. Karyawan tidak tetap	
	- Karyawan honorer	53
	- Karyawan kampanye	477
	- Karyawan musiman	104
	- Karyawan borongan	69
	- Karyawan harian	566
	Total	927

Sumber : Dokumen Pabrik Gula Djombang Baru Jombang, 2012.

Adapun pengaturan jam kerja dibagi menjadi dua yaitu jam kerja untuk karyawan yang berada di pabrik dan jam kerja untuk karyawan yang ada di kantor. Untuk karyawan di pabrik setiap hari masuk termasuk hari Minggu dan hari besar.

a. Jam kerja karyawan di pabrik dibagi menjadi tiga, yaitu :

1) Shift masuk pagi

Jam 05.30 – 13.00 WIB

2) Shift masuk siang

Jam 13.00 – 21.30 WIB

3) Sedangkan di atas jam 21.30 dianggap jam lembur



b. Jam kerja untuk karyawan di kantor adalah :

Hari Senin sampai Sabtu 06.30 – 11.30 WIB

Jam istirahat 11.30 – 12.30 WIB

Hari Jum'at 06.00 – 11.30 WIB

#### 4. Produksi dan Hasil Produksi

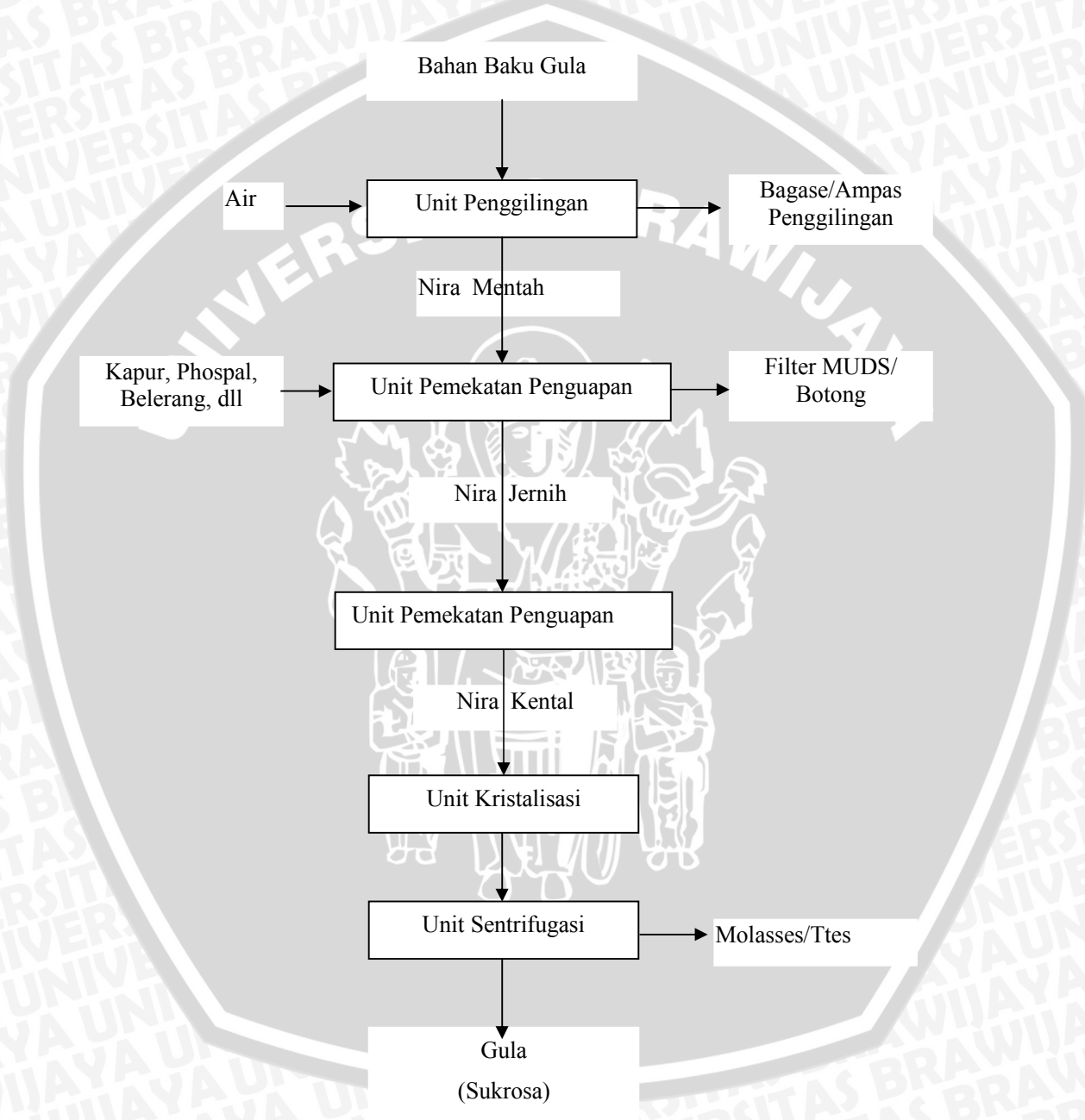
a. Proses Produksi

Produksi adalah setiap usaha yang dapat menghasilkan barang atau jasa yang dipakai untuk memenuhi kebutuhan manusia atau suatu tindakan yang dapat mempertinggi nilai suatu produk. Proses produksi di Pabrik Gula Djombang Baru Jombang yang memproduksi gula dengan bahan baku tebu melalui beberapa proses per stasiun, meliputi : stasiun gilingan, stasiun pemurnian, stasiun penguapan, stasiun masakan, stasiun puteran, stasiun penyelesaian.

Adapun proses produksi dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 3  
Pabrik Gula Djombang Baru Jombang  
Skema Proses Pembuatan Gula



Sumber data : Dokumen Pabrik Gula Djombang Baru Jombang, 2012.

Bahan baku tebu sebelum proses di stasiun gilingan terlebih dulu ditampung diemplasemen tempat penampungan tebu, maksudnya agar jelas mengenai pemilik dan berat tebu. Cara pengaturan dari kebun diangkut dengan truk atau lori. Untuk yang diangkut dengan truk setelah sampai diemplasemen dibongkar dipindahkan ke lori kemudian dibawa ke timbangan ditimbang dan ditempatkan di ril ban tempat penampungan yang siap untuk digiling.

Adapun proses pengolahan tebu berikutnya sampai menjadi gula adalah sebagai berikut :

#### 1) Stasiun gilingan

Di dalam stasiun gilingan tebu digiling tujuannya adalah untuk memisahkan antara nira dengan ampas tebu agar diperoleh nira sebanyak-banyaknya. Pemerahan batang tebu dilakukan di antara rol-rol gilingan (terdiri dari 3 rol) yang berputar bersama-sama, sehingga batang tebu mengalami penekanan kemudian akan bergerak ke rol berikutnya sampai lima gilingan dengan ditambah air ambibisi, sehingga pekerjaan pemerasan dapat berjalan secara terus-menerus agar mendapatkan hasil pemerahan yang tinggi. Hasil kerja dari stasiun gilingan adalah nira mentah dan ampas tebu.

#### 2) Stasiun pemurnian

Setelah mengalami proses di stasiun gilingan maka proses selanjutnya di stasiun pemurnian yang tujuannya untuk sebanyak mungkin komponen bukan gula yang ikut terlarut dalam ampas tebu.

Pada proses ini diberikan bahan pembantu pengolahan gula yang terdiri dari :

- a) Susu kapur
- b) Belerang.

Untuk mendapatkan endapan kotoran yang diserap sehingga komponen bukan gula yang disebut blotong akan lebih mudah disisihkan dan dikeluarkan, kemudian menghasilkan nira encer yang akan diolah pada stasiun penguapan.

3) Stasiun penguapan

Pada stasiun penguapan bertujuan untuk membuat nira encer menjadi pekat. Dengan jalan menguapkan air yang terdapat dalam nira encer, sebab hasil kerja proses pemurnian tersebut masih membawa cukup banyak penyusun bahan gula termasuk air, di mana air yang terkandung di dalam nira encer ini sekitar 80-85%.

Untuk dapat mengambil gula murni dalam bentuk kristal maka air harus dihilangkan dengan jalan diuapkan sampai kadar air yang terkandung dalam nira 32-40%, ini tujuannya untuk mempermudah pengaturan pada proses masakan atau kristalisasi nanti.

4) Stasiun masakan

Kerja stasiun masakan adalah proses kristalisasi, bertujuan mengubah gula dalam bentuk larutan menjadi kristal yang ukurannya tertentu. Untuk mengubah hal tersebut dengan cara

menaikkan kadar untuk menguapkan airnya dari bawah jenuh, penguapan ini dilakukan dalam tekanan hampa. Dengan demikian kerusakan gula oleh pengaruh suhu tinggi dapat dihindari agar didapatkan kristal dengan mutu yang baik (warna dan ukuran kristal).

5) Stasiun puteran

Stasiun ini bertujuan memisahkan kristal dari larutan induknya. Hasil dari proses kristalisasi adalah suatu masa campuran yang terdiri dari larutan dan kristal gula.

6) Stasiun penyelesaian

Di dalam stasiun penyelesaian terdapat alat pengering gula serendah mungkin. Kristal SHS yang keluar dari proses pemutaran masih relatif basah, untuk itu perlu dihilangkan kadar airnya. Untuk produksi SHS telah ditentukan bahwa kadar air tidak boleh melebihi 0,1% karena akan penggumpalan kristal yang berakibat menurunnya jasad renik yang menimbulkan kerusakan pada gula tersebut. Sehingga tidak tahan disimpan lama dalam gudang penyimpanan.

b. Hasil produksi

Hasil produksi Pabrik Gula Djombang Baru Jombang ini adalah gula putih, sedangkan hasil lainnya adalah :

1) Tetes

Dapat digunakan sebagai bahan baku spiritus, alkohol, dan bumbu masak (vetsin).

2) Ampas

Dapat digunakan untuk pembakaran ketel uap.

3) Blotong

Dapat digunakan sebagai pupuk tanaman.

Tetes adalah hasil sampingan artinya tetes dapat dijual ke pabrik yang memproduksi spiritus, sedangkan ampas dan blotong adalah hasil buangnya.

## 5. Pemasaran

### a. Daerah Pemasaran

Mulai tahun 1998 penentuan daerah pemasaran gula tergantung pada PTR (Petani Tebu Rakyat) itu sendiri, karena mulai bulan Juni 1998 pemerintah mulai memberikan kebebasan kepada petani untuk menjual sendiri.

### b. Penentuan dan Kebijakan Harga Jual

Untuk harga jual sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri Keuangan.

### c. Saluran Distribusi

Untuk saluran distribusi Pabrik Gula Djombang Baru mulai 1998 adalah sebagai berikut :

PG/Produsen → PTR → Konsumen

Keterangan :

PG = Pabrik Gula

PTR = Petani Tebu Rakyat

PG/Produsen mengeluarkan gula kepada PTR. PTR langsung mengambil gula tersebut dengan syarat menyelesaikan administrasi lagi pengambilan kredit :

- 1) Administrasi ke KUD adalah mengambil pupuk dan tenaga garap
- 2) Administrasi ke BRI untuk paket kredit
- 3) Administrasi PG untuk biaya operasional nilai giling sampai penyimpanan. Bagi petani yang tidak mengambil kredit, bisa langsung mengambil gula dengan hanya membayar administrasi kepada pabrik gula sebagai biaya operasional.

#### **6. Tujuan Perusahaan**

Dalam menjalankan aktivitas perusahaan tidak terlepas dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, karena tujuan perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan merupakan sasaran yang harus dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Pabrik Gula Djombang Baru Jombang meliputi :

- a. Tujuan jangka pendek
  - 1) Berusaha mencapai tingkat produksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  - 2) Berusaha meningkatkan kelancaran proses produksi
  - 3) Berusaha menjaga kualitas produk.
- b. Tujuan jangka panjang
  - 1) Memperoleh keuntungan yang maksimum dengan biaya yang minimum.
  - 2) Mempertahankan dan meningkatkan kontinuitas perusahaan.
  - 3) Mengadakan perluasan pemasaran hasil produksi.

## B. Penyajian Data Fokus

### 1. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru terhadap Masyarakat Sekitar

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) disusun sebagai dasar bagi BUMN dalam melaksanakan PKBL tersebut. Berdasarkan pasal 14 dan pasal 21 Undang-Undang No. 9/1995 tentang usaha kecil, dunia usaha diwajibkan untuk ikut membantu pembinaan, pengembangan, dan pembiayaan bagi usaha kecil. Sehingga sesuai dengan amanat dari undang-undang tersebut maka dalam Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN ditegaskan kembali bahwa salah satu tujuan dari pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Dan hal inilah yang kemudian disebut sebagai PKBL. Seperti hasil wawancara dengan Wasis Pramono selaku Kepala Bidang PKBL Pabrik Gula Djombang Baru sebagai berikut :

“Dasar dari terbentuknya suatu PKBL adalah UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang berkewajiban dalam pembinaan masyarakat dan Keputusan Menteri Negara BUMN No.: Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 mengenai teknis pelaksanaan PKBL yang didanai dari laba bersih BUMN, Pabrik Gula Djombang Baru”.

“Tujuan umum dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ini adalah kemandirian masyarakat dan secara spesifiknya adalah kemanfaatan secara ekonomi, sosial, dan ekologi”.

“Sasaran umum dari Program Kemitraan, yaitu membantu permodalan usaha kecil dalam bentuk dana dan untuk Program Bina Lingkungan adalah untuk membantu masyarakat mengatasi masalah sosial”.

“Adapun cara-cara untuk mendekati masyarakat antara lain melalui kerjasama dengan Kepala desa atau ”Pamong” yang ada dimasyarakat tersebut, agar pihak PG. Djombang Baru dapat mengetahui apa saja



keluhan warga dan itu bisa menjadi masukan bagi pihak kami".  
(wawancara : dilaksanakan pada 15 Mei 2012, pukul 10.00 WIB)

Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai organisasi bisnis yang bergerak di bidang produksi gula, Pabrik Gula Djombang Baru Jombang tidak hanya semata-mata mencari *profit* untuk kelangsungan perusahaan tetapi Pabrik Gula Djombang Baru Jombang juga ikut peduli terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat, khususnya masyarakat sekitarnya. Pabrik Gula Djombang Baru Jombang merasa berkewajiban untuk membantu pemerintah dalam membangun masyarakat dalam berbagai sektor. Beberapa kegiatan PKBL yang pernah dilakukan oleh Pabrik Gula Djombang Baru Jombang pada tahun 2011 adalah sebagai berikut :

a. Pengobatan gratis

a. Pengobatan 80 org x 10 kali x Rp. 20.000	Rp.	16.000.000
b. Snack 10 kali kegiatan @ Rp. 100.000	Rp.	1.000.000
c. Konsumsi 10 x 10 org x Rp. 15.000	Rp.	1.500.000
d. Dokumentasi	<u>Rp.</u>	<u>200.000</u>
Jumlah	Rp.	18.700.000

b. Khitanan massal

a. Pakaian dll 30 org x Rp. 100.000	Rp.	3.000.000
b. Uang saku 30 org x Rp. 100.000	Rp.	3.000.000
c. Konsumsi 30 org x Rp. 15.000	<u>Rp.</u>	<u>450.000</u>
Jumlah	Rp.	6.450.000

c. Donor darah		
	Konsumsi 50 org x 3 kali x Rp. 10.000	Rp. 1.500.000
d. Beasiswa		Rp. 37.500.000
e. Bantuan sembako		Rp. 25.000.000
f. Pasar Murah (beras, gula dan minyak goreng)		<u>Rp. 135.900.000</u>
Total		<b>Rp. 225.050.000</b>

Selanjutnya Wasis Pramono selaku Kepala Bidang PKBL Pabrik

Gula Djombang Baru juga mengatakan sebagai berikut :

“Kita menganggap kegiatan PKBL penting sekali, karena kita sebagai perusahaan produsen gula, yang namanya perusahaan berarti produksi untuk masyarakat, kalau kemudian kita tidak melibatkan publik dalam ikut aktif bersama kami, kita membangun dan kami tidak ikut membangun bersama mereka, maka kita akan ditinggalkan nanti, mereka tidak merasa memiliki kita gitu ya. Demikian halnya, kita tidak akan pernah memiliki publik, kalau di perusahaan ada profit, profit itu jangkauannya adalah konsumen, konsumen itu masyarakat. Nah, begitulah kita tidak sekedar mengeruk mereka sebagai konsumen, tapi memperlakukan mereka sebagai konsumen.” (Wawancara : dilaksanakan pada 15 Mei 2012, pukul 10.30 WIB)

Bentuk kepedulian Pabrik Gula Djombang Baru dalam bidang kesehatan Wasis Pramono selaku Kepala Bidang PKBL Pabrik Gula Djombang Baru juga mengatakan sebagai berikut :

“Kesehatan mulai dari sunatan massal, kemudian mengadakan pengobatan gratis, dan donor darah yang bekerjasama dengan beberapa lembaga medis, dan lain-lain sebagainya yang rutin kita lakukan setiap tahun yang dilakukan di Kota Jombang.” (Wawancara : dilaksanakan pada 15 Mei 2012, pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka PKBL dilaksanakan dengan filosofi dasar sebagai berikut:

a. Kewajiban

BUMN wajib melaksanakan PKBL yang dibiayai dari penyisihan sebagian laba bersih perusahaan.

b. Tugas Sosial

Pelaksanaan PKBL merupakan tugas sosial karena bukan merupakan *core business* BUMN dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan.

c. *Accountable*

BUMN wajib melakukan pembukuan tersendiri atas pelaksanaan PKBL (terpisah dari pembukuan atau laporan keuangan perusahaan) dan menyampaikan laporan berkala (triwulan) dan laporan tahunan yang telah diaudit oleh auditor independen kepada Menteri/RUPS. Kinerja pelaksanaan PKBL merupakan bagian dari penilaian kinerja perusahaan atau direksi yang tertuang dalam *key performance indicator* (KPI).

d. *Corporate Action*

Pelaksanaan PKBL merupakan *corporate action* sehingga selain organ BUMN (RUPS/Menteri, Komisaris/Dewan, Pengawas, dan Direksi), pihak lain manapun dilarang campur tangan dalam pengurusan BUMN.

Program Kemitraan sebagaimana telah disebutkan dalam UU No. 19/2003, BUMN dalam hal ini Pabrik Gula Djombang Baru pun berkewajiban untuk melaksanakan Program Kemitraan. Program Kemitraan antara BUMN ini dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri

melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan memiliki daya saing tinggi dan memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan dan kemampuan sendiri Dengan begitu Pabrik Gula Djombang Baru telah menyadari bahwa masyarakat secara umum memiliki sebuah modal personal yang secara sosial diharapkan mampu menjadi peluang bagi munculnya solusi yang tepat bagi pengembangan kualitas diri.

Bentuk Program Kemitraan ini adalah berupa pemberian pinjaman dengan menyertakan kegiatan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan (*capacity building*) usaha kecil yang dibina. Apabila diterjemahkan lagi maka kegiatan pambinaan ini meliputi 2 (dua) hal berikut:

a. Bidang produksi dan pengolahan

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan;
- 2) Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan;
- 3) Memberikan kemudahan dan bantuan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan;
- 4) Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.

b. Bidang pemasaran

- 1) Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
- 2) Menyediakan sarana serta dukungan promosi atau pameran;

- 3) Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi;
- 4) Memasarkan produk mitra binaan;
- 5) Menyediakan rumah dagang dan produksi;
- 6) Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan oleh Pabrik Gula Djombang Baru dalam menjaring mitra binaan:

- a. Mitra binaan dimaksud adalah usaha kecil yang secara teknis perbankan belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh pinjaman dari bank (belum *bankable*).
- b. Calon mitra binaan diutamakan kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah kerja Pabrik Gula Djombang Baru.
- c. Dalam penjaringan mitra binaan, pengurus Unit PKBL melakukan pendekatan secara proaktif kepada sentra-sentra usaha kecil, kelompok tani, usaha-usaha kecil lainnya, dan koperasi.
- d. Melakukan inventarisasi mitra binaan yang layak untuk diberi pinjaman.

Ketika melakukan penjaringan ini, kendala yang cukup sering ditemui adalah penentuan nilai-nilai kejujuran dan kedisiplinan untuk memenuhi pembayaran angsuran tepat waktu oleh Pabrik Gula Djombang Baru melalui Unit PKBL. Sehingga memang diperlukan pendekatan yang sangat proaktif kepada calon mitra binaan daripada sekedar pengisian formulir secara formal dan keinginan untuk memperoleh bantuan.

Berikut kegiatan yang dilakukan dalam menyalurkan pinjaman kepada mitra binaan:

- a. Berdasarkan inventarisasi, Unit PKBL melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meyakinkan bahwa penjangkaran tersebut tepat sasaran dan mampu mengembalikan pinjaman tepat waktu.
- b. Bagi calon mitra binaan, disyaratkan membuat proposal untuk dimintakan persetujuan BUMN Pembina.
- c. BUMN Pembina, dalam hal ini Pabrik Gula Djombang Baru, melakukan evaluasi dan seleksi melalui penelaahan proposal serta masukan dari Ketua Unit PKBL.
- d. Kemudian BUMN Pembina memberi keputusan berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan diterbitkan, yaitu Surat Keputusan Direksi.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi, Unit PKBL menyalurkan pinjaman tersebut dan kemudian dituangkan dalam suatu surat perjanjian atau kontrak.

Kegiatan pembinaan ini dilakukan secara bekerja sama dengan perguruan tinggi (universitas) dan atau yayasan dan kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau pelatihan, dengan materi pelatihan yang dapat dipahami oleh semua mitra binaan.
- b. Melakukan kunjungan lapangan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk membantu mitra

binaan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam usahanya.

- c. Kegiatan ini dilakukan secara periodik, agar berkelanjutan dan berkesinambungan antara materi yang telah diberikan selama pelatihan dengan penerapannya.
- d. Untuk mendorong kemajuan usahanya Unit PKBL juga melaksanakan program pemasaran melalui pameran, namun masih dalam skala kecil dan jangkauan pasar yang terbatas dan akan terus dilakukan dan ditingkatkan.

Pabrik Gula Djombang Baru melakukan Program Bina Lingkungan sebagai program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN, yang selanjutnya program ini memiliki lingkup, yaitu:

- a. Pasar murah BUMN Peduli 2011 berupa paket beras, gula dan minyak goreng dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru
- b. Bantuan bina lingkungan kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak limbah dan sebagai bentuk kepedulian Pabrik Gula Djombang Baru
- c. Bantuan bina lingkungan untuk kegiatan bhakti sosial sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab pabrik gula Djombang Baru kepada masyarakat yang terkena dampak limbah pabrik, seperti pengobatan gratis, sunatan masal dan donor darah.
- d. Beasiswa bagi mahasiswa prestasi dan kurang mampu.

Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan bantuan dari Program Bina Lingkungan:

- a. Secara proaktif pengurus Unit PKBL melakukan survey lapangan untuk mengidentifikasi terutama terhadap masyarakat yang berdomisili disekitar wilayah kerja Pabrik Gula Djombang Baru.
- b. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, Unit PKBL melakukan skala prioritas diutamakan terhadap masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan.

Dalam proses penyalurannya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Untuk penyaluran bantuan yang berbentuk bantuan beasiswa dan bidang keagamaan ditangani langsung oleh Unit PKBL setelah ada persetujuan BUMN Pembina melalui proses sebagai berikut:
  - 1) Penerima bantuan disyaratkan membuat proposal untuk dimintakan persetujuan dari BUMN Pembina.
  - 2) BUMN Pembina melakukan evaluasi terhadap proposal dan atau mengevaluasi objek serta meminta masukan dari Kepala Bidang PKBL.
  - 3) Setelah proposal disetujui, Unit PKBL melaksanakan penyaluran baik berupa uang maupun barang sesuai permintaan.
- b. Untuk bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana alam karena sifat mendadak dan mendesak maka penyaluran bantuan dilakukan melalui kerjasama dengan pihak atau instansi terkait, misalnya Palang



Merah Indonesia dan posko-posko yang ada di daerah bencana dan bentuk bantuan biasanya dalam bentuk barang sesuai kebutuhan.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru terhadap Masyarakat Sekitar**

Segala sesuatunya tidak ada yang luput dari kekurangan. Namun, dari pihak Pabrik Gula Djombang Baru selalu bertekad untuk terus melakukan berbagai pembenahan demi melanjutkan perjalanan menyiapkan generasi unggul berkualitas untuk masa depan Indonesia. Memang dari tahun ke tahun selalu ada evaluasi untuk setiap program yang dijalankan. Berikut yang diungkapkan oleh Kepala Bidang PKBL Pabrik Gula Djombang Baru.

”Keberadaan PKBL ini perlu mengingatkan pemerintah bertanggung jawab juga terhadap keadaan sosial yang terjadi di masyarakat. Dan kepentingan PKBL juga memberikan pemahaman atau kesadaran bagi masyarakat khususnya mengenai kelestarian lingkungan yang sesuai dengan lingkup kerja dari Pabrik Gula Djombang Baru”.

“Pelaksanaan kegiatan PKBL di Jombang sudah berjalan dengan baik, tidak ada kendala yang begitu berarti. Indikasinya dapat dilihat dari program-program yang diberikan setiap tahunnya. Tidak ada perubahan yang berarti dalam pelaksanaan program. Walaupun ada hambatan, itu datang dari penerima program PKBL sendiri”. (wawancara : dilaksanakan pada 15 Mei 2012, pukul 10.00 WIB)

Menjadi tanggungjawab dari Unit PKBL untuk melakukan kegiatan pemantauan yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah bantuan yang diberikan tepat sasaran atau tidak sehingga dapat

dipertanggungjawabkan. Hal ini dilakukan berdasarkan proposal pengajuan yang telah disepakati bersama dan kemudian dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Tetapi untuk bantuan yang sifatnya mendadak dan darurat seperti bantuan kepada masyarakat yang mengalami bencana alam maka bukti yang digunakan sebagai pertanggungjawaban adalah yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Unit PKBL Pabrik Gula Djombang Baru dan bekerja sama dengan posko-posko yang berada di daerah bencana dan atau perangkat desa setempat.

Mitra binaan yang mendapat bantuan adalah mereka yang mempunyai kriteria jenis komoditas berdaya saing cukup tinggi, calon mitra binaan yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan pembinaan diantaranya adalah Komoditas yang menjadi andalan daerah, komoditas tradisional yang potensial untuk dikembangkan. komoditas yang berpeluang ekspor atau berorientasi ekspor, komoditas yang dapat menyerap tenaga kerja/padat karya, akan tetapi mereka para mitra binaan mengalami beberapa kesulitan yang dihadapi dalam memngembangkan usahanya, diantaranya dikarenakan kesulitan dalam pemasaran, sistim manajemen, sumber daya manusia, permodalan dan teknologi. Kendala-kendala tersebut diharapkan dapat diatasi dengan cara adanya pembangunan kemitraan usaha, dimana para pengusaha tersebut dapat mandiri seperti yang diharapkan pemerintah yang mempunyai daya saing nasional yang kuat.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari bertambahnya jumlah mitra binaan serta semakin meningkatnya anggaran yang disalurkan dalam program ini. Dengan semakin banyaknya mitra binaan, maka upaya membangun kemitraan usaha dengan masyarakat pun juga semakin optimal. Berdirinya usaha-usaha kecil dari binaan Pabrik Gula Djombang Baru berimbas pula pada masyarakat yang berada disekitar tempat mitra binaan berdiri. Usaha kecil mitra binaan dapat menjadi lahan penyerap tenaga kerja, dimana masyarakat yang sebelumnya belum memiliki mata pencaharian direkrut oleh mitra binaan sehingga terberdayanya dan mendapatkan penghasilan dari usaha mereka. Selain meningkatkan jumlah mitra binaan, Pabrik Gula Djombang Baru juga menambah penyaluran dana pada setiap tahunnya.

Tabel 2  
Penyaluran Pinjaman Lunak Pabrik Gula Djombang Baru  
Tahun 2008-2011

Pinjaman Lunak						
Tahun	Usaha Kecil		Koperasi	Dana Pembinaan		Total
	Rp	Unit	Rp	Rp	Rp	Unit
2008	10.339.000	20	21.400.000	14.750.000	46.489.000	24
2009	6.225.000	16	9.700.000	13.933.000	29.858.000	19
2010	12.880.000	21	14.800.000	20.900.000	48.580.000	24
2011	60.507.000	18	17.380.000	38.400.000	116.287.000	21

Sumber: Pabrik Gula Djombang Baru Jombang.

Adapun wawancara yang telah dilakukan kepada beberapa mitra binaan Pabrik Gula Djombang Baru Pernyataan Bapak Agung selaku mitra binaan Pabrik Gula Djombang Baru pada tahun 2008 memiliki usaha dibidang jasa Pendidikan Belajar non Formal

“Alasan kenapa saya mengajukan permohonan peminjaman modal lunak kepada Pabrik Gula Djombang Baru karena bunganya rendah, kalau diberikan pinjaman dengan bunga rendah saya tidak begitu kesulitan dalam pelunasan. Dana yang saya dapatkan kurang lebih untuk melengkapi peralatan yang kurang, seperti computer, printer, dan lain-lain, kemudian sisanya saya gunakan untuk memperbaiki sarana dan prasarana belajar yang terlihat masih kurang layak. Kemudian saya juga diikutkan dalam pelatihan berwirausaha, disana saya diajarkan tentang bagaimana cara berwirausaha yang baik, strategi menjual jasa yang baik kepada konsumen, target yang harus dicapai dalam satu bulan, tatacara menyusun pembukuan untuk UKM, membuat perencanaan jangka pendek dan panjang.”  
(wawancara pada tanggal 4 Agustus, pukul 08.00-09.30 WIB)

Begitu juga dengan pernyataan Bapak Joko selaku mitra binaan Pabrik Gula Djombang Baru pada tahun 2009 memiliki usaha di bidang Peternak Ikan Lele.

“Saya mengajukan permohonan peminjaman kepada Pabrik Gula Djombang Baru sebanyak dua kali, pertama tahun 2009 dan 2011, dimana dana yang diberikan Pabrik Gula Djombang Baru kurang lebih saya gunakan untuk membeli bibit ikan lele dan membuat tambahan kolam. Saya merasa terbantu sekali dengan adanya program ini karena selain saya bisa menambah hasil produksi saya sekarang saya juga punya orang buat membantu saya ngurusin kolam, sampai sekarang ada empat orang yang ikut dengan saya.”  
(wawancara pada tanggal 4 Agustus 2012, pukul 15.30-17.00 WIB)

Adapun pernyataan Bapak Rudi selaku mitra binaan Pabrik Gula Djombang Baru pada tahun 2009 memiliki usaha di bidang jasa penjahit pakaian.

“Hal yang paling saya rasakan ketika saya mendapatkan bantuan pinjaman modal dari Pabrik Gula Djombang Baru saya merasa mendapatkan air dingin, pada saat dana bantuan modal itu cair kepada saya, pada saat itu juga saya pas lagi ada borongan jahitan, waktu itu lagi liburan kenaikan kelas, nah banyak ibu-ibu yang minta jahitkan pakaian sekolah buat anaknya sekolah. Jadi pada saat itu saya benar-benar tertolong sekali, dan sampai sekarang saya mencoba terus mengembangkan usaha jahitan saya, biarpun belum besar banget tapi sekarang saya sudah punya karyawan, ada tiga orang yang membantu saya. Biar nanti kalau ada borongan saya tidak susah-susah lagi cari orang.” (wawancara tanggal 4 Agustus 2012 pukul 15.00-16.00 WIB)

Ada beberapa faktor pendukung penerapan *Corporate Social Responsibility* dalam membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wasis Pramono sebagai berikut:

- a. Adanya dukungan dari para stakeholders antarlain pengelolaan perusahaan, para pemegang saham, pemerintah serta masyarakat sekitar, sehingga program kemitraan ini dapat dijalankan.
- b. Komitmen tinggi dari para karyawan baik dari program kemitraan dan bina lingkungan maupun seluruh karyawan Pabrik Gula Djombang Baru secara umum untuk memperluas jangkauan pembinaan ini, dengan begitu masyarakat yang diberdayakan akan semakin banyak.
- c. Adanya kebijakan pembagian laba yang diberikan perusahaan kepada program kemitraan dan bina lingkungan sebagai modal untuk membangun
- d. Program kerja yang disesuaikan dengan tuntutan masyarakat, sehingga dapat berjalan secara fleksibel, hal ini berguna agar dalam membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar dapat berjalan secara efektif dan efisien. (wawancara tanggal 4 Agustus 2012, pukul 10.30 WIB)

Dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* dalam membangun kemitraan dengan masyarakat sekitar di Pabrik Gula Djombang Baru tentu saja masih banyak mengalami kendala, baik itu secara internal maupun eksternal dari divisi program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL). Masalah-masalah tersebut menghambat proses

pelaksanaan program ini. Adapun beberapa masalah-masalah yang dihadapi adalah:

a. Kendala Internal

Secara internal masih kurangnya kemampuan SDM yang dimiliki oleh kemitraan dan Bina Lingkungan, terbatasnya kemampuan SDM yang mampu berkompeten guna untuk menjalankan operasional program PKBL yang sesuai dengan visi dan misi, maupun monitoring data perkembangan yang dimiliki oleh mitra binaan dimana jumlahnya semakin tahun semakin bertambah. Kendala internal ini serupa dengan apa yang diungkapkan oleh Bapak Wasis Pramono, yang mengungkapkan bahwa :

“Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu berkompeten, sangat dirasakan, dimana mereka dapat mengembangkan dan mencapai target dari visi dan misi yang diusung oleh PKBL itu sendiri, karena untuk perusahaan sebesar Pabrik Gula Djombang Baru ini, masih dirasakan kurang dalam pemberdayaan potensi lokal” (wawancara pada tanggal 4 Agustus 2012 pukul 10.40 WIB)

b. Kendala Eksternal

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan seperti halnya program-program bantuan lainnya masih dianggap sebagai bentuk pemberian sesaat dimana yang masih bersifat sosial. Sesuai kondisi sosial dan lingkungannya, sebagian masyarakat masih belum terbiasa menjalankan kehidupan berbisnis dan masih dihindangi dengan pemikiran-pemikiran dimasa lampau, bahwa suatu bantuan diberikan itu hanya berbentuk santunan konsumtif.

Kebanyakan dari warga masih berpandangan, bahwa kehidupan berwirausaha itu kurang begitu menguntungkan bagi mereka, mereka lebih baik hidup sebagai pekerja, buruh atau karyawan yang berpenghasilan sedikit dari pada berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai seorang wirausahawan yang bisa menciptakan lapangan kerja atau pasar bagi kehidupan orang lain. Kondisi seperti ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran yang relatif rendah dari pengembalian dana pinjaman, termasuk kompetensi mitra binaan dalam ruang pemasaran untuk meraih peluang. Hal ini serupa dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Wasis Pramono yang mengatakan.

“Dari KBL sendiri tidak ada masalah dalam penyaluran dana kepada para calon mitra binaan yang ingin mendapatkan bantuan modal kerja, akan tetapi pada saat angsuran yang seharusnya menjadi kewajiban dari mitra binaan terkadang masih banyak yang menunggak, kami memaklumi karena dalam perintisan suatu usaha tidak mungkin langsung sukses, kami tidak memaksakan untuk membayar tepat waktu dan memberikan toleransi penundaan pembayaran, asalkan mereka terus berkomitmen untuk mau mengembangkan usahanya dan ketika mereka sudah kami lihat sudah mulai membaik, baru kami akan mengingatkan kembali kalau mereka masih memiliki tanggung jawab terhadap kami.” (wawancara pada tanggal 4 Agustus 2012, pukul 11.00 WIB).

### **3. Dampak Penerimaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai *Corporate Social Responsibility***

Dalam pelaksanaannya, PKBL dimaksudkan untuk mendatangkan kemanfaatan secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Secara ekonomi, cukuplah jelas bahwa melalui Program Kemitraan secara khususnya diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas kerjanya baik dalam

hal pengelolaan maupun hasilnya. Kemudian berturut-turut secara sosial dan ekologisnya, melalui Program Bina Lingkungannya, merupakan wujud dari kepedulian Pabrik Gula Djombang Baru bersama masyarakat untuk membangun dan mengembangkan kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan kemanfaatan dalam hal pelestarian lingkungan yang tentunya mampu tetap menjaga keseimbangan ekosistem, seperti yang diungkapkan beberapa masyarakat penerima bantuan bina lingkungan yang terkena dampak limbah Pabrik Gula Djombang Baru sebagai berikut :

“Saya merasa senang dengan adanya pemberian bantuan sebagai bentuk kepedulian Pabrik Gula Djombang Baru terhadap lingkungan sekitar.”

“Dengan diadakannya pasar murah BUMN menjelang Natal dan tahun baru dapat membantu ekonomi keluarga, karena pada saat barang-barang naik ada bantuan dari Pabrik Gula Djombang Baru dengan harga paket murah berupa paket beras, gula dan minyak goreng.”

“Adanya pengobatan gratis yang diadakan Pabrik Gula Djombang Baru dapat membantu saya di saat sakit tanpa mengeluarkan uang, sehingga dapat meringankan beban keluarga.” (wawancara : dilaksanakan pada 05 Juni, pukul 09.00 WIB)

Kemudian peneliti melakukan wawancara pada beberapa orang yang mengikuti Program Kemitraan, sebagai berikut: Dalam usaha kerajinannya, yaitu kerajinan meubel, Bapak Achmad mendapatkan bantuan berupa pinjaman dana dari pihak Pabrik Gula Djombang Baru (PKBL). Menurut beliau kerjasama yang dilakukannya dan Pabrik Gula Djombang Baru terjalin karena kebutuhannya akan pengembangan usahanya, yaitu dengan tambahan modal. Kemudian Pabrik Gula



Djombang Baru menawarkan untuk mengikuti Program Kemitraan yang kemudian beliau akan diberikan sejumlah uang sebagai pinjaman yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam waktu yang telah ditentukan pula beliau bersama sejumlah peserta dari program tersebut, khususnya yang berasal dari kota Jombang mengikuti program pembinaan dalam bentuk pelatihan akutansi, yaitu pembuatan pembukuan sederhana dan hanya dilakukan sekali. Beliau juga menambahkan bahwa beberapa kali pihak Pabrik Djombang Baru berkunjung ke tempat usahanya untuk melihat perkembangan usahanya dan memberikan beberapa masukan mengenai usahanya. Dalam dua kali kesempatan beliau juga pernah mengikuti pameran kerajinan yang oleh Pabrik Gula Djombang Baru dimaksudkan agar usaha beliau bisa dikenal oleh masyarakat luas dan menunjukkan bahwa beliau mendapatkan pembinaan dari Pabrik Gula Djombang Baru Pinjaman yang diperolehnya untuk pengembangan usahanya memang dapat menambah modalnya tetapi beliau juga mengharapkan bisa mendapatkan pinjaman lebih besar. Dari hubungan yang terjalin ini Pabrik Gula Djombang Baru cukup bertanggung jawab dengan mitra binaannya. Sehingga mengambil kesempatan pula untuk melakukan pendekatan secara personal kepada informan. Semangat berwirausaha informan yang ditunjang dengan bantuan dana diberdayakan oleh Pabrik Gula Djombang Baru untuk menjamin jalannya usaha informan dan menjadi kewajiban juga bagi Pabrik Gula Djombang Baru untuk menjamin pengembalian pinjaman tepat waktu dan lancar.

Begitu juga dengan Bapak Rokhim yang menurutnya pinjaman modal yang didapatkannya kurang dapat mengembangkan usahanya lebih besar tetap meskipun demikian cukup dapat menambah tambahan modal dari modal yang sudah dimilikinya sebelumnya untuk usaha kantinnya. Bersama 15 rekannya yang lain yang juga mengikuti Program Kemitraan ini, dalam sekali kesempatan mendapatkan pembinaan berupa pelatihan pembukuan sederhana oleh Pabrik Gula Djombang Baru. Pada dasarnya mereka sudah mengetahui dan paham bagaimana membuat pembukuan bagi usahanya sehingga dapat mengikuti pembinaan tersebut dengan baik meskipun hanya sekali diadakan. Informasi adanya program ini tidak secara inisiatif dicari dan diperoleh oleh informan tersebut tetapi pihak Pabrik Gula Djombang Baru yang langsung menemuinya untuk menawarkan program ini diikutinya. Disini terlihat bahwa Pabrik Gula Djombang Baru berinisiatif secara langsung untuk menawarkan program. Hal ini merupakan sebuah komitmen dari Pabrik Gula Djombang Baru yang mengambil peran dalam pemberdayaan masyarakat dengan membantu masyarakat. Kebutuhan inilah yang ditangkap oleh Pabrik Gula Djombang Baru untuk dapat memainkan perannya dan tentunya adanya peluang untuk mendapatkan bantuan dari Pabrik Gula Djombang Baru merupakan kesempatan juga bagi masyarakat untuk berkesempatan mengikutinya. Sehingga dapat dilihat bahwa ada kepercayaan dari masyarakat bahwa Pabrik Gula Djombang Baru sebagai lembaga

pemerintahan juga memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial masyarakat yang mustahil dapat dipecahkan sendiri oleh masyarakat kecuali tanpa dukungan dari banyak pihak dan salah satunya dari Pabrik Gula Djombang Baru. Inilah yang kemudian diberdayakan oleh Pabrik Gula Djombang Baru I dalam melaksanakan programnya, yaitu kepercayaan.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Samiyati, didapatkan informasi bahwa program ini tidak diperolehnya secara langsung dari PKBL-Pabrik Gula Djombang Baru tetapi dari para perangkat (pamong) desa yang mendatangi rumahnya dengan tujuan selain menyampaikan adanya program tersebut juga sekaligus melakukan pendataan identitas dan jenis usahanya. Tetapi dalam beberapa tahun ini ia belum mendapatkan jawaban dari pihak Pabrik Gula Djombang Baru bahkan perangkat desa, apakah ia berhak mendapatkan pinjaman modal tersebut atau dengan kata lain, dapat bekerjasama dalam Program Kemitraan tersebut meskipun ada kebutuhan juga dari informan untuk mengembangkan usahanya melalui pinjaman dari Pabrik Gula Djombang Baru dari Program Kemitraan.

Sedangkan bagi masyarakat yang tidak memperoleh bantuan dari Pabrik Gula Djombang Baru merasa kecewa seperti yang diungkapkan Haryono salah satu masyarakat sebagai berikut :

“Saya merasa kecewa dengan Pabrik Gula Djombang Baru dalam memberikan bantuan tidak adil, karena seharusnya saya sebagai warga masyarakat memperoleh bantuan sebagai bentuk kepedulian Pabrik Gula Djombang Baru terhadap lingkungan sekitar, hal ini menunjukkan bahwa Pabrik Gula Djombang Baru kurang bekerjasama dengan perangkat desa dalam mendata warga yang

seharusnya sebagai penerima bantuan.” (wawancara : dilaksanakan pada 05 Juni, pukul 09.45 WIB)

### **C. Pembahasan**

#### **1. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru terhadap Masyarakat Sekitar**

Dalam beberapa kali wawancara dan pengambilan data dengan Bapak Wasis Pramono selaku Kepala Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, peneliti mendapatkan informasi yang cukup dalam menjelaskan bagaimana pelaksanaan PKBL di Pabrik Gula Djombang Baru. Dengan tetap berpegangan pada petunjuk teknis pelaksanaan, dijelaskan bahwa PKBL merupakan bidang kerja yang baru dalam institusi tersebut secara khusus tetapi secara umum telah ditetapkan secara wajib bagi lembaga-lembaga pemerintahan khususnya lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam untuk menyelenggarakan PKBL ini. Tetapi sebenarnya dalam bentuk program yang sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan PKBL.

Lebih lanjut, terselenggaranya kegiatan inipun melibatkan masyarakat sekitar dengan tujuan bahwa kelangsungan hidup ekosistem akan membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan masyarakat sekitar tentunya. Bahwa kesadaran untuk tetap menjaga lingkungan sebagaimana mestinya inilah yang dibangun oleh Pabrik Gula Djombang Baru. Kemudian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dijalankan oleh Pabrik Gula Djombang Baru sifatnya pemberian pinjaman

untuk Program Kemitraan dan sifatnya sosial dan atau pelatihan untuk Program Bina Lingkungan. Dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 tentang PKBL maka bentuk bantuan Program Bina Lingkungan adalah:

- a. Bantuan bencana alam;
- b. Bantuan pendidikan dan atau pelatihan;
- c. Bantuan peningkatan kesehatan;
- d. Bantuan pengembangan prasarana dan atau sarana umum;
- e. Bantuan sarana ibadah;
- f. Bantuan untuk pelestarian alam.

Tujuan umum dari masing-masing program ini adalah kemandirian masyarakat. Dengan maksud bahwa kelak masyarakat mampu secara otonomi untuk memberdayakan apa yang ada secara mandiri namun tetap dalam koridor yang telah ditetapkan oleh Pabrik Gula Djombang Baru. Apabila di kemudian hari yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pabrik Gula Djombang Baru maka akan ditindaklanjuti kemudian oleh Pabrik Gula Djombang Baru. Untuk Program Kemitraan dijelaskan bahwa tujuan secara spesifik adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Dengan kata lain, usaha tersebut memiliki daya saing tinggi dan memiliki kemampuan memecahkan masalah dengan bertumpu pada kepercayaan

dan kemampuan sendiri. Sedangkan untuk Program Bina Lingkungan tujuannya adalah pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, PKBL dimaksudkan untuk mendatangkan kemanfaatan secara ekonomi, sosial, dan ekologi. Secara ekonomi, cukuplah jelas bahwa melalui Program Kemitraan secara khususnya diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas kerjanya baik dalam hal pengelolaan maupun hasilnya. Kemudian berturut-turut secara sosial dan ekologinya, melalui Program Bina Lingkungannya, merupakan wujud dari kepedulian Pabrik Gula Djombang Baru bersama masyarakat untuk membangun dan mengembangkan kondisi sosial masyarakat menjadi lebih baik dan memberikan kemanfaatan dalam hal pelestarian lingkungan yang tentunya mampu tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Bahwa Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 ini membawa perubahan atau dengan kata lain penambahan pada beberapa bagian, seperti ruang lingkup Bina Lingkungan yang bertambah menjadi enam bagian dengan bantuan untuk pelestarian alam sebagai tambahannya. Sedangkan untuk Program Kemitraan ruang lingkungannya meliputi pemberian pinjaman yang disertai dengan pembinaan dalam rangka meningkatkan kemampuan (*capacity building*) usaha kecil yang dibina. Pembinaan yang diberikan dalam bentuk kegiatan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas mitra binaan.

Kegiatan PKBL ini dapat dilakukan dengan lembaga lain di luar Pabrik Gula Djombang Baru yang memiliki kompetensi, seperti pihak LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) Universitas. Dengan pertimbangan bahwa kemampuan lembaga-lembaga ini dalam hal pembinaan menjadikan lembaga-lembaga ini mitra kerja bagi Pabrik Gula Djombang Baru dalam melaksanakan fungsinya dalam PKBL.

Tata cara kerjasama atau mekanisme penyaluran dana (penerapan program) PKBL adalah sebagai berikut:

- a. Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan, yaitu:
  - 1) Calon mitra binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya;
  - 2) Pabrik Gula Djombang Baru melakukan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon mitra binaan;
  - 3) Calon mitra binaan yang layak dibina, menyelesaikan proses administrasi pinjaman dengan Pabrik Gula Djombang Baru;
  - 4) Pemberian pinjaman kepada calon mitra binaan dituangkan dalam surat perjanjian atau kontrak.
- b. Tata cara bantuan dana Program Bina Lingkungan, yaitu:
  - 1) Pabrik Gula Djombang Baru terlebih dahulu melakukan survei dan identifikasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah usaha Pabrik Gula Djombang Baru;

- 2) Pelaksanaan program Bina Lingkungan dilakukan oleh Pabrik Gula Djombang Baru melalui Kantor kelurahan atau RT/RW (Pamong) ke masyarakat.

Prinsip *responsibility* dalam *Good Corporate Governance* merupakan pijakan bagi perusahaan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban sosial perusahaan. Wahyudi dan Azhari (2008:167) menjelaskan bahwa *responsibility* merupakan wujud tanggungjawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat yang runduk pada aturan hukum yang berlaku dan bertindak dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Dengan begitu perusahaan tidak lagi hanya bertindak sebagai *single bottom line* saja yang hanya memperhatikan dari aspek ekonomi *profit* semata, akan tetapi juga harus bertindak sebagai *triple bottom line* yang juga memperhatikan dari aspek masyarakat (*social*) dan lingkungan (*environment*).

Aspek Ekonomi (*profit*) adalah motivasi utama dari setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan yang jelas untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu berbagai upaya akan dilakukan oleh perusahaan demi mendapatkan keuntungan. Aspek ekonomi sendiri pada hakikatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Adapun aktivitas yang ditempuh oleh Pabrik Gula Djombang Baru dalam meningkatkan aspek ekonomi yaitu dengan cara meningkatkan produktifitas dan melakukan



efisiensi biaya pengeluaran, dengan begitu perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat menghasilkan nilai tambah semaksimal mungkin.

Aspek Masyarakat (*Social*), yaitu dengan menyadari bahwa perusahaan merupakan bagian dari masyarakat dan merupakan salah satu *stakeholder* penting bagi perusahaan, karena dengan adanya dukungan dari masyarakat, keberadaan suatu perusahaan dapat diakui dengan baik, dengan begitu perusahaan dapat menjalankan kelangsungan hidup dan perkembangan dari perusahaan dengan baik pula. Sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan lingkungan, Pabrik Gula Djombang Baru meyakini perlunya komitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan pertanggung jawaban sosial perusahaan. Selain dari itu perlu diketahui bahwa suatu bentuk dari operasional perusahaan akan memberikan dampak kepada masyarakat sekitar, baik dalam makna positif atau dalam makna negative. Oleh karena itu Pabrik Gula Djombang Baru merasa perlu untuk menyusun program dan kegiatan yang bertujuan agar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi mereka, dengan komitmen ini melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) perusahaan berkeyakinan dapat memberikan kontribusi dan pandangan

positif kepada masyarakat, sebagai bentuk kompensasi atas dampak yang diterima oleh masyarakat.

Kemudian aspek Lingkungan (*Environment*) yaitu dalam hal ini Pabrik Gula Djombang Baru memahami bahwa hubungan antara manusia dan lingkungan merupakan hubungan kausalitas, dimana apabila perusahaan dapat merawat lingkungan dengan baik, maka lingkungan akan memberikan manfaat lebih baik lagi kepada perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan merusak lingkungan maka perusahaan akan menerima akibat dari kerusakan yang disebabkan olehnya. Maka dari itu Pabrik Gula Djombang Baru merasa perlu dalam menjalankan aspek lingkungan ini, sebagai bagian yang harus diperhatikan dalam aktivitas dalam menjalankan operasional perusahaan demi keselarasan dalam menjalani kehidupan, baik itu yang dirasakan oleh Pabrik Gula Djombang Baru sendiri ataupun yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Perusahaan merupakan suatu lembaga yang tujuan utamanya adalah mencari keuntungan, dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimana menurut undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasal 1 menyebutkan bahwa “Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa BUMN merupakan

perusahaan yang dengan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara, yang merupakan sumber penerimaan keuangan Negara serta kewajiban untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa untuk masyarakat, guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

## **2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar**

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan bisa berjalan efektif dan efisien. Dukungan *stakeholder* antara lain dari pengelola perusahaan, para pemegang saham, pemerintah serta masyarakat yang menjadi mitra binaan, memperlancar berjalannya program ini. Dalam perundang-undang No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil dijelaskan bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan usaha kecil yaitu dengan cara menumbuhkan iklim yang mendukung pembangunan usaha kecil serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan kemitraan usaha. Program kemitraan yang dilakukan oleh Pabrik Gula Djombang Baru, dimana iklim usaha yang dirasakan sudah cukup kondusif. Dari mulai pengelola perusahaan, pemegang saham serta karyawan perseroan yang memiliki komitmen dalam mendukung operasional program ini. Alokasi dana yang disiapkan

oleh perusahaan sudah cukup mengakomodir kebutuhan pinjaman serta hibah yang diperlukan oleh mitra binaan. Di samping itu pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dalam hal ini dilakukan oleh bagian program kemitraan tidak menyusahkan mitra binaan.

Komitmen yang tinggi dari perseroan dalam mengimplementasikan program kemitraan menjadi pendukung utama berjalannya program ini secara selektif. Hal ini tampak dari dukungan para *stakeholder*, manajemen perusahaan yang berpegang pada *Good Corporate Governance*, komitmen dari karyawan Pabrik Gula Djombang Baru serta dukungan dari program kemitraan yang selalu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Prinsip *Responsibility* dalam *Good Corporate Governance* menjadi acuan bagi pengelola manajemen perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi perusahaan sebagai Pembina dan pada intinya perusahaan berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan mitra binaannya.

Menurut pemikiran Elkington tentang *Triple Bottom Line*, *Corporate Social Responsibility* adalah adanya segitiga dalam kehidupan *stakeholder* yang mesti diperhatikan oleh korporasi di tengah usahanya mencari profit. Menurutnya, kapitalisme yang ingin berkelanjutan haruslah tidak semata-mata mengejar deviden, perusahaan dan bahkan kapitalisme itu sendiri yang ingin berkelanjutan, harus memperhatikan 3 P. Perusahaan harus

memperhatikan kesejahteraan masyarakat (*people*), dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*), di samping mencari keuntungan (*Profit*). Sesuai dengan pemikiran Elkington, Pabrik Gula Djombang Baru Jombang sebagai sebuah perusahaan, tidak hanya mementingkan *profit*, tapi juga terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu serta mengembangkan masyarakat.

Setelah melakukan kegiatan PKBL tentunya Pabrik Gula Djombang Baru Jombang mempunyai laporan kegiatan baik untuk intern perusahaan maupun ekstern kepada masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan gula, maka bentuk laporan Pabrik Gula Djombang Baru Jombang adalah berita-berita tentang kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Foto-foto kegiatan yang dimuat dalam halaman surat kabar maupun data-data berupa nama-nama dan jumlah sumbangan yang telah diberikan. Idealnya, perusahaan yang menggelar program-program PKBL juga membuat laporan sebagai fase akhir setelah serangkaian proses panjang yang dilewati. Manfaatnya, selain bisa digunakan untuk bahan evaluasi terpadu, juga bisa menjadi alat komunikasi dengan *stakeholders*, termasuk mitra bisnis dan kalangan investor. Hal itu senada dengan apa yang dilakukan oleh Pabrik Gula Djombang Baru Jombang, karena berita-berita, data-data maupun foto-foto tentang kegiatan PKBL yang telah dilakukan oleh Pabrik

Gula Djombang Baru Jombang adalah bentuk Pabrik Gula Djombang Baru Jombang kepada masyarakat serta bentuk terima kasih Pabrik Gula Djombang Baru Jombang terhadap partisipasi dan kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat kepada Pabrik Gula Djombang Baru Jombang.

Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan PKBL adalah sebagai berikut :

a. Faktor pendukung

Beberapa faktor pendukung yang membuat pelaksanaan program kemitraan ini bisa berjalan efektif dan efisien. Dukungan *stakeholder* antara lain dari pengelola perusahaan, para pemegang saham, pemerintah serta masyarakat yang menjadi mitra binaan, memperlancar berjalannya program ini. Dalam undang-undang No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil dijelaskan bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan usaha kecil yaitu dengan cara menumbuhkan iklim yang mendukung pembangunan usaha kecil serta pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan kemitraan usaha. Program kemitraan yang dilakukan oleh Pabrik Gula Djombang Baru dimana iklim usaha yang dirasakan sudah cukup kondusif. Dari mulai pengelola perusahaan, pemegang saham serta karyawan perseroan yang memiliki komitmen dalam mendukung operasional program ini. Alokasi dana yang disiapkan oleh perusahaan sudah cukup mengakomodir kebutuhan pinjaman serta hibah yang diperlukan oleh

mitra binaan. Di samping itu pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dalam hal ini dilakukan oleh bagian program kemitraan tidak menyusahkan mitra binaan.

Komitmen yang tinggi dari perseroan dalam mengimplementasikan program kemitraan menjadi pendukung utama berjalannya program ini secara selektif. Hal ini tampak dari dukungan para *stakeholder*, manajemen perusahaan yang berpegang pada *Good Corporate Governance*, komitmen dari karyawan Pabrik Gula Djombang Baru serta dukungan dari program kemitraan yang selalu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Prinsip *Responsibility* dalam *Good Corporate Governance* menjadi acuan bagi pengelola manajemen perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi perusahaan sebagai Pembina dan pada intinya perusahaan berperan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan mitra binaannya.

b. Faktor penghambat

Dalam program kemitraan Pabrik Gula Djombang Baru, tidak luput dari kendala-kendala yang dihadapi baik itu secara internal maupun eksternal dari unit pelaksana program.

1) Kendala Internal

Secara internal masih kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh unit pelaksana program

kemitraan, terbatasnya kemampuan SDM yang mampu berkompeten guna untuk menjalankan operasional program kemitraan yang sesuai dengan visi dan misi. Begitu pula dengan memonitoring data perkembangan yang dimiliki oleh mitra binaan, dimana jumlahnya semakin tahun semakin bertambah. Hal ini dapat diupayakan dengan cara peningkatan Profesionalisme, yaitu peningkatan kemampuan kerja dari tiap individu-individu sebagai unit pelaksana program kemitraan yang diharapkan, agar dapat lebih berkompeten dan visioner dalam melakukan tugasnya, adapun usaha yang dilakukan dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan di bidang *Community Development* dan hubungan dengan masyarakat.

## 2) Kendala Eksternal

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai unit pelaksana, seperti halnya program-program bantuan lainnya masih dianggap sebagai bentuk pemberian sesaat, dimana yang masih bersifat sosial semata. Sesuai dengan kondisi sosial dan lingkungannya, sebagian masyarakat masih belum terbiasa menjalankan kehidupan berbisnis dan masih dihindangi dengan pemikiran-pemikiran dimasa lampau, bahwa suatu bentuk bantuan diberikan itu hanya berbentuk santunan konsumtif yang tidak ada kelanjutannya. Disinilah dibutuhkanannya peranan perusahaan sebagai Pembina dimana perusahaan sebagai aktor yang



membangun sinergi dengan masyarakat. Adapun pembangunan sinergi itu dapat dilakukan dengan cara mengajak masyarakat untuk bekerjasama dengan berbagai instansi-instansi yang berkaitan dengan pengembangan usaha dari mitra binaan, yang kemudian mengajak pihak-pihak yang berkompeten dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, dalam memonitoring perkembangan usaha dari mitra binaan, termasuk dengan pengoptimalisasi upaya penagihan pinjaman. Kemudian banyaknya dari warga yang masih berpandangan, bahwa kehidupan berwirausaha itu kurang begitu menguntungkan bagi mereka, mereka lebih baik hidup sebagai pekerja, buruh atau karyawan, yang berpenghasilan sedikit dari pada harus berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai seorang wirausahawan, yang bisa menciptakan lapangan kerja atau pasar bagi kehidupan orang lain. Kondisi seperti ini dapat dilihat dari tingkat kesadaran yang relative rendah dari pengembalian dana pinjaman, termasuk kompetensi mitra binaan dalam ruang pemasaran untuk meraih peluang. Adapun cara yang bisa ditempuh dalam meminimalisir kondisi buruk seperti ini dapat dilakukan dengan peningkatan penyuluhan yaitu dengan menggalakan kegiatan penyuluhan hukum mengenai hak dan kewajiban dari mitra binaan, khususnya kepada mitra binaan yang bermasalah dengan tujuan agar mitra binaan mengerti apa saja yang menjadi

hak dan kewajiban dari mereka, diharapkan adanya kesadaran dari mitra binaan.

### **3. Dampak Penerimaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai *Corporate Social Responsibility***

Apa yang dilakukan Pabrik Gula Djombang Baru Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sesungguhnya lebih dari sekedar bentuk tanggung jawab sosial sebuah perusahaan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholders*). PBKL lahir dari sebuah komitmen untuk turut berperan dalam pengembangan kualitas manusia Indonesia. Komitmen ini bukan datang dengan begitu saja, melainkan dari hati warga Pabrik Gula Djombang Baru yang tahu mengenai bagaimana berterima kasih. Tidak bisa dipungkiri bahwa Pabrik Gula Djombang Baru menjadi sebuah perusahaan yang cukup diperhitungkan bukan hanya di Indonesia melainkan di dunia. Tetapi Pabrik Gula Djombang Baru Beasiswa Plus tidak hanya berorientasi kepada sebuah keuntungan komersial semata. Keuntungan citra setidaknya. Semua berorientasi pada bagaimana perusahaan yang dibesarkan di Indonesia berkontribusi untuk menciptakan sebuah generasi berkualitas yang nantinya akan membawa Indonesia ke kehidupan yang lebih baik lagi, sebuah bentuk ketulusan.

Pabrik Gula Djombang Baru sadar jika ikhtiar yang mereka lakukan hanyalah sebuah implementasi dari semangat 4 (empat) pilar tanggung jawab sosial PT. Pabrik Gula Djombang Baru yang terdiri atas niat baik, lingkungan dan sosial, keseimbangan, dan keberlanjutan. Pemaknaan ini

didasarkan atas niat baik yang tulus berbakti kepada bangsa. Ini adalah sebuah kontribusi nyata dari perusahaan asli Indonesia untuk bangsa yang telah mengasuh dan membesarkannya. Semangat kepedulian ini benar-benar menjadi sebuah nilai yang lain ketika Pabrik Gula Djombang Baru Beasiswa ini hadir di tengah masyarakat. Semangat yang selalu dikedepankan adalah semangat untuk membangun, berbakti, dan mengantarkan generasi terbaik bangsa ini menjadi generasi unggul. Tentu saja, semua niat tersebut tidak perlu dilakukan terlampau jauh. Pabrik Gula Djombang Baru Beasiswa mengawali dan terus akan melangkah untuk mengembangkan kualitas pendidikan di Indonesia, tidak perlu beranjak ke luar, karena di sini Pabrik Gula Djombang Baru masih sangat dibutuhkan untuk mengantarkan sebuah peningkatan kualitas kepribadian.

Adapun dampak program kemitraaan dan bidang lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru adalah sebagai berikut :

- a. PKBL yang dilaksanakan oleh Pabrik Gula Djombang Baru memang cukup dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat baik secara sosial, ekonomi, dan ekologi. Seperti halnya Program Kemitraan rata-rata memang peserta program merasa cukup dengan bantuan modal yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan usahanya tetapi tetap ada harapan dari peserta agar dana yang dipinjamkan dapat lebih besar.
- b. Dari kegiatan PKBL yang dilakukan meskipun baru berjalan, Pabrik Gula Djombang Baru tetap mengusahakan untuk memaksimalkan sasaran dari programnya seperti pemberian bantuan dana dalam Progam

Kemitraan, yaitu Pabrik Gula Djombang Baru melakukan observasi kecil untuk memperoleh data mengenai calon mitra binaan yang dapat diperoleh melalui lembaga pemerintahan lokal seperti kantor kecamatan, lembaga penyalur seperti LSM sosial, dan paguyuban. Sehingga nantinya dapat menjadi masukan apakah calon mitra binaan tersebut layak untuk memperoleh bantuan modal atau tidak. Kemudian juga dalam Program Bina Lingkungan, contohnya pemberian beasiswa bagi murid SD yang sebelumnya pihak Pabrik Gula Djombang Baru mengkonsultasikan kepada pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah untuk memberikan masukan kepada Pabrik Gula Djombang Baru mengenai anak-anak yang layak untuk memperoleh bantuan beasiswa tersebut. Dengan kata lain Pabrik Gula Djombang Baru memanfaatkan institusi atau ikatan-ikatan yang ada di tengah-tengah masyarakat lokal.

c. Pelaksanaan PKBL telah diatur secara formal dalam petunjuk teknis pelaksanaan peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: Per-05/MBU/2007 Tanggal 27 April 2007 tentang PKBL. Dalam beberapa kondisi seperti keterbatasan personil, pengetahuan teknis, prasarana, dan sejenisnya maka PKBL dapat bekerjasama dengan pihak yang memiliki kompetensi.

Kemitraan usaha dirancang sebagai bagian dari upaya pemberdayaan usaha masyarakat. Pengusaha besar berperan sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai kemampuan dan kompetensinya dalam mendukung mitra usahanya menuju kemandirian usaha. Dalam kondisi

yang ideal dalam Jafar (1999:63) dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan yaitu:

- a. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat
- b. Meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan
- c. Meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional
- e. Memperluas kesempatan kerja
- f. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional

Dengan semakin banyaknya jumlah mitra binaan perusahaan pada tiap tahunnya, semakin besar pula dana yang disalurkan dan semakin berkembang pula usaha kecil mitra binaan. Hal ini memberikan rasa kepuasan sekaligus motivasi tersendiri bagi perusahaan khususnya kepada unit-unit pelaksana Program Kemitraan.

Dalam usaha mengimplementasikan konsep *Corporate Social Responsibility*, setiap perusahaan akan berbeda-beda, untuk itu menurut Yanti R. Koestoer definisi tentang *Corporate Social Responsibility* memang tidak bisa dibakukan karena implementasi dan penjabaran yang dilakukan perusahaan berbeda-beda. Hanya saja intinya tetap sama yaitu selalu mengacu pada kenyataan bahwa *Corporate Social Responsibility* merupakan bagian dari strategi bisnis yang berkaitan dengan kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Hal itu juga diungkapkan oleh Pabrik Gula Djombang Baru. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang produksi

gula, Pabrik Gula Djombang Baru menganggap kegiatan *Corporate Social Responsibility* sangat penting bagi keberlanjutan perusahaan. Pabrik Gula Djombang Baru yakin dan percaya bahwa besar dan kecilnya Pabrik Gula Djombang Baru bergantung pada masyarakat dimana masyarakat sebagai konsumen dan mitra bagi perusahaan. Pabrik Gula Djombang Baru sangat menyadari bahwa mereka akan ditinggalkan ketika perusahaan tidak memberikan kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya. Pabrik Gula Djombang Baru tidak memiliki masyarakat begitu juga sebaliknya, masyarakat tidak akan merasa memiliki Pabrik Gula Djombang Baru, sehingga tidak terbentuk harmonisasi antara perusahaan dan masyarakat dan tentunya hal itu sangat tidak diinginkan oleh Pabrik Gula Djombang Baru. Sebagaimana layaknya makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, Pabrik Gula Djombang Baru membutuhkan masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Pabrik Gula Djombang Baru juga akan merasa sangat berdosa ketika perusahaan hanya mengambil keuntungan dari masyarakat sebagai konsumen yang menjadi sumber utama *profit* perusahaan tanpa ikut membangun dan memberikan kepedulian sosial terhadap masyarakat, untuk itu kegiatan *Corporate Social Responsibility* mutlak untuk dilakukan demi kelangsungan perusahaan.

Keuntungan melakukan CSR secara sosial dan lingkungan alam bagi keberlanjutan perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan citra perusahaan di mata *stakeholder*.

- b. Membina hubungan/interaksi yang positif dengan komunitas lokal, pemerintah dan kelompok-kelompok lainnya.
- c. Mendorong peningkatan reputasi dalam pengoperasian perusahaan dengan etika yang baik.
- d. Menunjukkan komitmen perusahaan, sehingga tercipta kepercayaan dan respek dari pihak terkait.
- e. Membangun pengertian bersama dan kesetiakawanan antara dunia usaha dengan masyarakat.
- f. Mempermudah akses masuk ke pasar atau pelanggan.
- g. Meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja, sehingga semangat loyalitas terhadap perusahaan akan berkembang.
- h. Mengurangi risiko perusahaan yang mungkin dapat terjadi.
- i. Meningkatkan keberlanjutan usaha secara konsisten.
- j. Produk semakin disukai oleh konsumen dan perusahaan semakin diminati investor.
- k. Meningkatkan penjualan dan *market share*.
- l. Memperkuat *brand positioning*.
- m. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan.
- n. Menurunkan biaya operasional.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan dari bab I hingga bab IV dapat disimpulkan mengenai Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar, sebagai berikut :

1. Kegiatan PKBL Pabrik Gula Djombang Baru telah sesuai dengan konsep PKBL dimana Pabrik Gula Djombang Baru melakukan kegiatan-kegiatan yang dilatarbelakangi oleh kepedulian sosial Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitarnya. Pabrik Gula Djombang Baru sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah melaksanakan pertanggungjawaban sosial perusahaan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan yang dilakukan oleh Perseroan adalah memberikan bantuan berupa pinjaman modal kerja dan pembinaan. Sedangkan Bina Lingkungan adalah program bantuan yang bersifat *charity*, diberikan Perseroan kepada masyarakat melalui enam fokus program bantuan yaitu program pembangunan bencana alam, program pendidikan dan bencana alam, program peningkatan kesehatan masyarakat, program pembangunan sarana umum, program pembangunan sarana ibadah, program pelestarian lingkungan.



2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat sekitar yaitu adanya dukungan dari dukungan *stakeholder* antara lain dari pengelola perusahaan, para pemegang saham, pemerintah serta masyarakat yang menjadi mitra binaan. Di samping itu CSR merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap masyarakat. Konsep CSR melibatkan tanggung jawab kemitraan bersama antara perusahaan, pemerintah, lembaga sumber daya masyarakat, serta komunitas setempat. Kewajiban perusahaan atas CSR diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Pengaturan CSR juga bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya.
3. Dampak program program kemitraaan dan bidang lingkungan Pabrik Gula Djombang Baru yaitu memberikan kemanfaatan secara ekonomi, sosial, dan ekologi, sehingga memberikan *image* yang baik terkait dengan upaya perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosialnya baik bagi *stakeholder* maupun lingkungan. Hal tersebut berarti bahwa secara tidak langsung pengungkapan CSR dilakukan sebagai upaya untuk menarik

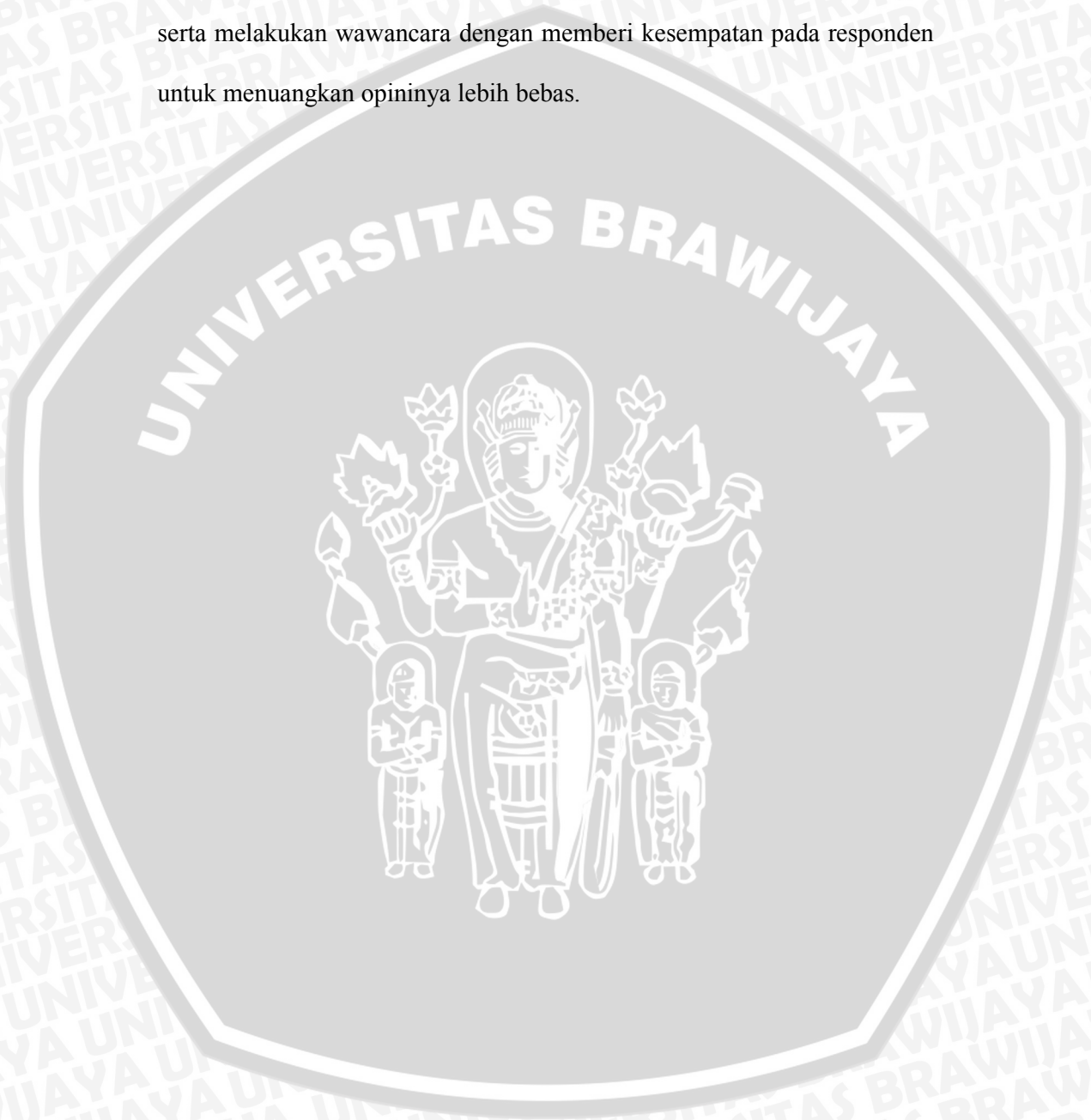
perhatian investor dan *stakeholder*. Hal ini berarti bahwa pengungkapan CSR akan memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan berupa penilaian positif dari investor maupun *stakeholder* karena kepedulian perusahaan terhadap kepentingan *stakeholder* dan lingkungan..

### B. Saran

Setelah menulis hasil penelitian ini, maka saran yang diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pabrik Gula Djombang Baru agar lebih meningkatkan kualitas PKBL, perlu diberi sedikit penyegaran atau inovasi lain untuk menjaga eksistensi agar dapat memberikan yang terbaik buat PG. Djombang Barunya sendiri maupun untuk masyarakat sekitar dan agar masyarakatnya bisa ikut berpartisipasi dengan program-program yang telah diberikan, dan menggunakan program yang ada dengan semaksimalnya.
2. Kegiatan PKBL Pabrik Gula Djombang Baru yang telah sesuai dengan konsep PKBL diharapkan dapat terus konsisten dengan konsep PKBL dan diharapkan untuk ke depannya kegiatan yang dilakukan lebih bervariasi.
3. Bagi masyarakat diharapkan agar dapat ikut berpartisipasi mensukseskan kegiatan PKBL yang diwujudkan dalam bina kemitraan karena kegiatan tersebut sangat memerlukan dukungan dari masyarakat itu sendiri untuk mencapai tujuan yang terbaik.

4. Untuk penelitian yang akan datang hendaknya mengkaji permasalahan yang berasal dari aspek lain dan memperluas item-item yang mendukung serta melakukan wawancara dengan memberi kesempatan pada responden untuk menuangkan opininya lebih bebas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mufiz. 2004. *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Budimanta, Arif. Prasetijo, Adi. Rudito, Bambang. 2008. *Corporate Social Responsibility: Alternatif Bagi Pembangunan Indonesia*. Jakarta: ICSD
- Bobo Julius, 2003. *Transformasi Ekonomi Rakyat*, Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power Of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap. 2002. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indra, Surya dan Yustiavanda, Ivan. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Indradi, Syamsiar. 2008. *Administrasi Pemerintahan Local*. Malang: Agritek YPN.
- Iriantara, Yosol. 2004. *Community Relations: Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Jafar, Muhammad. 1999. *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Khairandy, Ridwan dan Malik, Camelia. 2007. *Good Corporate Governance : Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Prespektif Hukum*, Yogyakarta: Total Media
- KNKG. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana
- Kurniawan. 2006. *Good Governance*. Surabaya : Insan Cendekia.
- Lembaga Administrasi Negara. 2000, *Akuntabilitas dan Good Governance*, Jakarta LAN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajement Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- \_\_\_\_\_. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan (PKBL)
- Rachman, Nurdizal M.; Asep Efendi; dan Emir Wicaksana. 2011. *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sadhana, Kridawati. 2010. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: Penerbit Percetakan CV. Citra.
- Said dan Abidin. 2004. *Menilai Tanggung Jawab Sosial*. Depok : Piramedia.
- Seitel, Fraser F. 1992. *The Practice of Public Relations: Fifth Edition*. New York: Macmillan Publishing Company
- Solichin, Ismail. 2008. *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (cet. 4). Bandung: Alfabeta.
- Sukidin, Damai Darmadi. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo
- Syafiie. 1997. *Kebijakan Publik dan Pembangunan*. Yogyakarta: ANDI.
- Tjager, I Nyoman; F. Antonius Alijoyo. 2003. “*Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis Indonesia*”. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahyudi, Isa dan Azheri, Busyra. 2008. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Peraturan dan Implementasi*. Malang: In-Trans Publishing
- Wiyoto, Budi. 2005. *Mengembangkan Riset Strategik Implementasi Kebijakan Publik Prespektif Good Governance*, Malang: Partner Consulting.
- PG Djombang Baru dan PTPN X, 2012 “ <http://www.ptpn10.com/>” (diakses pada tanggal 15 Maret 2012 pukul : 21.00 wib)

Wirawan, Ira. 2007 *Corporate Sosial Responsibility*

“<http://ewepe.wordpress.com/2007/06/21/csr/>” (diakses pada tanggal 15 Maret 2012 pukul : 22.00 wib)

Muliana, Arief. 2006. *Pengertian Corporate Sosial Responsibility*

“<http://www.csrindonesia.com/>” (diakses pada tanggal 15 Maret 2012 pukul : 22.15 wib)

Manne, G. Henry. *Tanggung Jawab Perusahaan*

“[http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung\\_jawab\\_sosial\\_perusahaan](http://id.wikipedia.org/wiki/Tanggung_jawab_sosial_perusahaan)” (diakses pada tanggal 15 Maret 2012 pukul : 22.30 wib)

Bappeda. 2010. *Sistem Informasi CSR/PKBL Jawa Timur*

“[http://csrjatim.org/v3/database/csr-bl/p\\_kota/12/](http://csrjatim.org/v3/database/csr-bl/p_kota/12/)” ((Diakses pada tanggal 01 Juni 2012 pukul : 15.00 wib)

[http://www.lpp.ac.id/berita\\_detail.php?act=view&id=232](http://www.lpp.ac.id/berita_detail.php?act=view&id=232) (Diakses pada tanggal 01 Juni 2012 pukul : 15.00 wib).





Jalan Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya 60175  
Telepon (031)-3523143 (Hunting) Fax (031)-3523167  
Homepage : http://www.ptpn10.com  
E-mail : contact@ptpn10.com

Nomor : IO-RUPA-2012.086  
Lampiran : -  
Perihal : JIN PENELITIAN  
Surabaya, 15 Maret 2012

Kepada :  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
Jl. MT. Haryono 163  
Malang

Menunjuk surat Saudara 274&UN10.3/PTPNX/2012 tanggal 9 Maret 2012 perihal tersebut di atas, dengan ini dihimbau/himbau bahwa pada dasarnya kami dapat menyetujui/membahkan ijin kepada Saudara untuk melaksanakan Penelitian di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero):

- Nama : Jundi NIM. 0710313061
- Sekolah : Universitas Brawijaya
- Fakultas/ Jurusan : Fakultas Ilmu Administrasi // Administrasi Publik
- Tingkat/ Semester : -
- Waktu : 19 Maret - 31 Mei 2012
- Judul : Dampak Program PKBL sebagai CSR Pabrik Gula Djombang Baru terhadap masyarakat Sekitar
- Tempat : PG. Djombang Baru

Setelah selesai melaksanakan Kerja Praktek / Magang (OJT) / Penelitian, diminta untuk menyerahkan hasil / laporannya kepada Kantor Direksi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Jl. Jembatan Merah No 3 - 11 Surabaya.

Demikian hendaknya maklum.

Tanda-tanda

- Administrator PG. Djombang Baru.

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)



**Bambang Wasito Hadi**  
Kepala Urusan Pengembangan SDM



**Pabrik Gula Djombang Baru**  
Jalan Panglima Sudirman no. 1 Jombang 61417  
Telepon (0321)–861311 Fax (0321)–866373  
E-mail : pg\_dbu@telkom.net

**SURAT KETERANGAN**  
**No. : IC-SURKT / 12.019**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala HAK & Umum PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) Pabrik Gula Djombang Baru menerangkan bahwa :

Nama : Jundi  
NIM : 07100313061  
Jurusan : Administrasi Publik  
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya

Telah melaksanakan Penelitian di PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) PABRIK GULA DJOMBANG BARU dengan judul Pogram Kemitraan dan Bina Lingkungan Sebagai *Corporate Social Responsibility* Pabrik Gula Djombang Baru Terhadap Masyarakat Sekitar mulai pada 19 Maret 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Jombang, 30 Juni 2012  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
Pabrik Gula Djombang Baru



**Frans Budi Sulistyio, SH**  
Kepala HAK&Umum



2 X

FROM : FIBL PT PL 10      FROM : 001      FROM : 001 012345 67

27 APR 2011

**MEMO**  
PL-22260-M/11.000

**Kepada** : Yth. Administrator Pabrik Gula Djombang Baru  
**Dari** : Bidang PKBL – PT Perkebunan Nusantara X (Persero)

Surabaya, 21 April 2011

**PERSETUJUAN BANTUAN BINA LINGKUNGAN**  
Surat Sdr. No. PK-20210/11 028-4/4

Menunjuk perihal pada pokok, terkait permintaan bantuan bina lingkungan untuk kegiatan bhakti sosial sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab pabrik gula Djombang Baru kepada masyarakat yang terkena dampak limbah pabrik pada prinsipnya dapat kami setujui dengan dana sebesar Rp. 26.650.000 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

<b>A. Pengobatan Gratis</b>		
- Pengobatan 80 Or. x 10 kali x Rp. 20.000	= Rp.	16.000.000
- Snak 10 kali kegiatan @ Rp. 100.000	= Rp.	1.000.000
- Konsumsi 10 x 10 Orang @ Rp. 15.000	= Rp.	1.500.000
- Dokumentasi	= Rp.	200.000
	<b>Jumlah</b>	<b>= Rp 18.700.000</b>
<b>B. Khitanan Masal</b>		
- Pakain dll 30 Or x Rp. 100.000	= Rp.	3.000.000
- Uang Saku 30 Or x Rp. 100.000	= Rp.	3.000.000
- Konsumsi 30 Or x Rp. 15.000	= Rp.	450.000
	<b>Jumlah</b>	<b>= Rp 6.450.000</b>
<b>C. Donor Darah</b>		
- Konsumsi 50 Or x 3 kali x Rp. 10.000	= Rp.	1.500.000
	<b>Jumlah</b>	<b>= Rp. 1.500.000</b>
	<b>Total</b>	<b>= Rp. 26.650.000</b>

Dropping dana akan dilaksanakan setelah kami menerima laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis disertai dokumentasi.

Demikian untuk menjadikan maklum.

<input checked="" type="checkbox"/>	Kabag. A. K. & U
<input type="checkbox"/>	Kabag. Tanaman
<input type="checkbox"/>	Kabag. Instalasi
<input type="checkbox"/>	Kabag. Pengolahan
<input type="checkbox"/>	Ka. Mutu & Control

Ditandatangani  
TH → Riwu

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
BIDANG PKBL

WASIS PRAMONO  
Kepala Bidang PKBL  
- Dr. Pola Mantun Poli  
Pusat Cap. Kaji  
Petah Manan 1/4

FROM : PUBLIS

07 DEC 2011

MEMO  
PK-22260-M/11

Kepada : Yth. Administrator Pabrik Gula Djombang Baru  
Dari : Bidang PKBI. - PT Perkebunan Nusantara X (Persero)

Surabaya, 07 Desember 2011

PASAR MURAH BUMN PEDULI 2011

Sehubungan dengan Program Kementerian BUMN, agar BUMN melalui PKBI melaksanakan Pasar Murah BUMN Peduli 2011 menjelang Natal. Dengan ini kami mengharapkan PG Djombang Baru dapat melaksanakan Pasar Murah di Wilayah Jombang dengan dana subsidi sebesar Rp 135.900.000,- (seratus tiga puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai lanjutan dari pelaksanaan Pasar Murah BUMN Peduli 2011 sebelumnya menjelang bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri.

Demikian untuk mendapat perhatian

PT PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)  
BIDANG PKBI

DISPOSISI ADMINISTRASI	
<input checked="" type="checkbox"/>	Katag. A, K & U
<input type="checkbox"/>	Katag. Tanaman
<input type="checkbox"/>	Katag. Instalasi
<input type="checkbox"/>	Katag. Pengolahan
<input type="checkbox"/>	Katag. General
Ditujukan ke:	

ut  
  
Dr. H. HARI MUSTIKA DJAJA  
Kepala Urusan Keuangan PKBI

4/10/2011  
Ditujukan ke: 10. PKBI Kd.

Seluruh copy = Katag. Haku  
- PP  
Jahn

**NOTULEN RAPAT  
HASIL RAPAT BUMN JAWA TIMUR  
PASAR MURAH BUMN PEDULI 2011**

**TANGGAL 05 DESEMBER 2011 – DI PIPN 10 (PERSERO)**

Menunjuk Surat Kementerian Badan Usaha Milik Negara NO: S- 436/MBU/2011 Tanggal 25 Juli 2011 tentang Pasar Murah BUMN Peduli 2011, maka Koordinator PKBL Jatim mengadakan rapat kedua yang dipimpin oleh Kepala Bidang PKBL PIPN 10 (Persero) selaku Koordinator PKBL BUMN Jatim dengan hasil sebagai berikut :

1. Dana Pasar Murah BUMN Peduli 2011 untuk masing – masing daerah Kota/Kabupaten untuk tahap II sebesar Rp 135.900.000,- yang dilaksanakan di 31 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur
  2. Dana akan di transfer kepada BUMN Pelaksana Pasar Murah tanggal 07 Desember 2011
  3. Tahap Pelaksanaan Pasar Murah BUMN Peduli 2011 tahap II dilaksanakan mulai tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan 22 Desember 2011
  4. Biaya operasional sebesar 5 % dari dana pasar murah tersebut
  5. Bila biaya lebih dari kelebihan biaya operasional dari 5 % maka menjadi beban biaya BUMN Pelaksana Pasar Murah
- Pelaksanaan Pasar Murah harap membuat laporan tertulis disertai dokumentasi dan diserahkan kepada Koordinator PKBL BUMN Jatim
- Untuk Paket barang berupa **Beras, gula dan minyak goreng** sebagai acuan dan Spanduk Pelaksanaan Pasar Murah BUMN Peduli 2011 :

KEMENTERIAN BUMN BERSAMA BUMN  
DALAM RANGKA MENYAMBUT NATAL & TAHUN BARU  
MENYELENGGARAKAN :  
"PASAR MURAH BUMN PEDULI"  
BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU  
DI PROVINSI JAWA TIMUR

Demikian atas perhatian dan partisipasinya kami sampaikan terimakasih



**WASIS PRAMONO**  
Kepala Bidang PKBL

EL. PT. H. 10

FO. DA. 10.11.2011

NO. 20.11.2011

2x

20.11.2011

**MEMO**  
PK-22260-M/11.001

**Kepada : Yth. Adminstratur -- Pabrik Gula Djombang Baru**

**Dari : Bidang PKBL -- PT Perkebunan Nusantara X (Persero)**

Surabaya, 25 September 2011

**PERSETUJUAN DANA BINA LINGKUNGAN BANTUAN SEMBAKO DI WILAYAH PG DJOMBANG BARU**  
Surat Sdr. No. PK-20210/11.043-11/8

Menunjuk perihal pada pokok surat, terkait permintaan bantuan bina lingkungan kepada masyarakat sekitar yang terkena dampak limbah dan sebagai bentuk kepedulian PT Perkebunan Nusantara X (Persero) pada prinsipnya dapat kami setujui biayanya sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).

Dropping dana akan dilaksanakan setelah direalisasi dan dilaporkan ke Bidang PKBL secara tertulis disertai dengan dokumentasi.

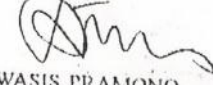
Demikian disampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**PT PERKEHUNAN NUSANTARA X (PERSERO)**

DISPOSISI ADMINISTRATIF
1. Kepala Bidang
2. Kepala Subbidang
3. Kepala Seksi
4. Kepala Divisi
5. Kepala Kantor
6. Kepala Dinas
7. Kepala Balai
8. Kepala Stasiun
9. Kepala Pos
10. Kepala Kantor

Wb

**BIDANG PKBL;**



**WASIS PRAMONO**  
Kepala Bidang PKBL

Y di TLi,  
semai pramono

20/9/11

PP  
Tubuhan JP

